

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kebijakan dan Teori**

##### **a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**

Undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tertuang penjelasan terkait dunia usaha, seperti berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk berperan aktif dalam memberdayakan UMKM di tingkat lokal, memastikan implementasi

kebijakan secara efektif. Kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar dan institusi keuangan diatur untuk merangsang pertumbuhan sektor ini melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan memfokuskan pada pemantauan dan pelaporan berkala, undang-undang ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sanksi yang diatur dalam undang-undang menciptakan dorongan untuk mematuhi ketentuan dan menjaga integritas sektor UMKM.

Pentingnya pemberdayaan diimplementasikan melalui berbagai aspek, seperti pembinaan, pelatihan, dan fasilitas akses pasar. Pembinaan membantu UMKM mengelola usaha secara efisien, sementara pelatihan meningkatkan keterampilan manajemen, produksi, dan pemasaran. Dukungan finansial melalui kredit dan modal usaha memberikan UMKM kesempatan untuk berinovasi dan berkembang.

Dengan menyatukan konsep-konsep ini, undang-undang ini menciptakan landasan hukum yang menyeluruh, memberikan perlindungan, dukungan, dan fasilitas bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi Indonesia.

#### **b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Pengaturan terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sebagaimana dijelaskan dalam paparan sebelumnya baik dari segi teori maupun teknis. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan undang-undang tersebut ternyata tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang pada tanggal 2 November 2020 meresmikan sebuah undang-undang baru, yaitu Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan potensi UMKM dengan cara yang lebih luas, optimal, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui peluasan kesempatan berusaha dan pemberian dukungan secara menyeluruh dalam berbagai aspek. Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM, tetapi juga memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah telah melakukan amandemen terhadap sejumlah pasal yang terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perubahan ini melibatkan penambahan, pencabutan, maupun penyederhanaan beberapa ketentuan, sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari pihak pemerintah. Tujuan dari perubahan ini ialah memberikan jalan yang lebih lancar dan kemudahan bagi perkembangan serta kemajuan UMKM.

Berbagai kemudahan yang diakomodasi dalam Undang-undang Cipta Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut, terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh UMKM.

**Tabel 2.1 Perubahan Undang-undang UMKM ke Undang-undang  
Cipta Kerja**

| <b>Undang-undang Nomor 20 Tahun<br/>2008 tentang UMKM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Undang-undang Nomor 11 Tahun<br/>2020 tentang Cipta Kerja</b>                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><u>Diatur dalam Pasal 21</u></p> <p>Terkait dengan pembiayaan dan penjaminan untuk UMKM, dalam UU tersebut terdapat penambahan kata “dapat”, yang mengindikasikan adanya opsi bagi pemerintah untuk memberikannya atau tidak.</p>               | <p align="center"><u>Diatur dalam Pasal 21</u></p> <p>Pada UU Cipta Kerja, penghapusan kata “dapat” menciptakan kepastian hukum dengan mengharuskan pemerintah memberikan pembiayaan untuk UMKM.</p>                                                                   |
| <p align="center"><u>Diatur dalam Pasal 12</u></p> <p>Hanya menggambarkan inti dari Pasal 7 ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa izin usaha dapat diperoleh melalui proses penyederhanaan satu jalur yang memberikan kemudahan dalam segi biaya.</p>           | <p align="center"><u>Ditambahkan dalam Pasal 91</u></p> <p>Pada Undang-undang ini, luasnya izin usaha telah diperluas secara spesifik dan diterangkan lebih rinci melalui ketentuan Pasal 91 yang mengatur prosedur pendaftaran perizinan dengan lebih terperinci.</p> |
| <p align="center"><u>Diatur dalam Pasal 12</u></p> <p>Dalam Undang-undang ini, hanya diuraikan bahwa salah satu tujuan dari aspek kesempatan berusaha adalah memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan tanpa adanya penjelasan yang lebih terperinci.</p> | <p align="center"><u>Ditambahkan dalam Pasal 96</u></p> <p>Dalam UU Cipta Kerja, Pasal 96 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam bidang perlindungan hukum, yang kemudian ditindak lanjuti melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).</p>       |

*Sumber: Khair (2022)*

**c) Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.**

Dalam mendukung kegiatan program yang berjalan, pemerintah DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 agar dapat melakukan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dengan memberikan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha melalui cara kolaboratif antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga atau pihak Lainnya.

Sasaran dari Peraturan ini mengarah kepada wirausaha pemula, wirausaha naik kelas, dan pencari kerja. Sebab, mempunyai tujuan dari pengembangan kewirausahaan terpadu tersebut dimaksudkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai Wirausaha melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha.
- 4) Meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM.
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM serta IKM dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

- 6) Mengarahkan kebijakan dan dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Anggota pengembangan kewirausahaan terpadu akan dibantu oleh perangkat daerah sebagai penyelenggara yang terdiri atas :

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Perangkat Daerah Penyelenggara mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan PKT melalui pendaftaran dan program peningkatan kapasitas wirausaha yang meliputi pelatihan, pendampingan wirausaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan fasilitasi permodalan.

#### 1) Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran peserta sebagai berikut:

##### (a) Wirausaha Pemula

- i. Memiliki Kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- ii. Surat pernyataan rencana membuka usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui aplikasi.

##### (b) Wirausaha Naik Kelas

- i. Memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta.
- ii. Bukti kepemilikan usaha.

- iii. Surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui aplikasi.

Bagi para wirausaha pemula dan wirausaha naik tingkat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta dapat mendaftar dengan ketentuan berdomisili dan beraktivitas di Jakarta paling sedikit 2 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah.

## 2) Pelatihan

Melalui program peningkatan kapasitas, wirausaha dapat mengikuti pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara. Pelatihan yang diberikan dibagi menjadi 2 pelatihan, yaitu pelatihan teknis dan nonteknis.

- (a) Pelatihan teknis akan memberikan pelatihan mengenai teknis produksi dan pengembangan produk.
- (b) Pelatihan nonteknis akan memberikan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan manajemen usaha, promosi dan pemasaran produk.

Dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang diberikan akan melibatkan para tenaga ahli, terdiri dari:

- (1) Tenaga ahli untuk pelatihan teknik memiliki kualifikasi, antara lain memiliki sertifikat profesi, sertifikat keahlian, sertifikat atau surat tugas dari lembaga atau pihak lainnya, mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 3 tahun yang dibuktikan dengan dokumen pelatihan.
- (2) Tenaga ahli untuk pelatihan nonteknis memiliki kualifikasi, antara lain pendidikan minimal sarjana, memiliki pengalaman pelatihan kewirausahaan atau praktisi pendidikan kewirausahaan paling sedikit 3 tahun, memiliki sertifikat keahlian bidang kewirausahaan, memiliki usaha

besar atau menduduki jabatan setingkat direksi di perusahaan besar.

### 3) Pendampingan wirausaha

Dalam penyelenggaraan program, pendampingan wirausaha bagi peserta dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara dan lembaga. Pendamping yang diberikan mempunyai tugas seperti berikut:

- (1) Memberikan bantuan teknis dan arahan kepada pelaku usaha dalam bidang pemasaran, permodalan, laporan keuangan.
- (2) Memberikan dorongan yang baik kepada pelaku usaha.
- (3) Memberikan ide-ide kreatif dalam memajukan pelaku usaha.
- (4) Melakukan perubahan pola pikir Kewirausahaan.
- (5) Membantu mencari penyelesaian permasalahan pelaku usaha.
- (6) Membentuk pelaku usaha yang unggul di wilayah kerjanya.
- (7) Tugas lain yang menunjang pelaksanaan pendampingan ahli.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendamping wirausaha, yaitu:

- (1) Kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta;
- (2) Ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
- (3) Surat keterangan catatan kepolisian;
- (4) Surat keterangan bebas narkoba;
- (5) Diutamakan bagi yang telah memiliki usaha dan
- (6) pengalaman memberikan pendampingan usaha; dan
- (7) Sertifikat pendamping wirausaha yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4) Perizinan

Peserta difasilitasi untuk mendapatkan dokumen perizinan atau nonperizinan terkait usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dokumen dapat dilakukan secara

perorangan atau kolektif oleh Perangkat Daerah Penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan proses dokumen perizinan dan/atau nonperizinan terkait Kewirausahaan bagi Peserta. Penyelenggaraan pelaporan dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5) Pemasaran

Perangkat Daerah Penyelenggara baik secara mandiri maupun bersama-sama, dengan Lembaga atau Pihak Lainnya memfasilitasi pemasaran produk Peserta PKT. Penyelenggaraan pemasaran dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

6) Pelaporan keuangan

Peserta difasilitasi untuk menyusun pelaporan keuangan usaha berbasis aplikasi melalui pelatihan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara.

7) Fasilitasi permodalan

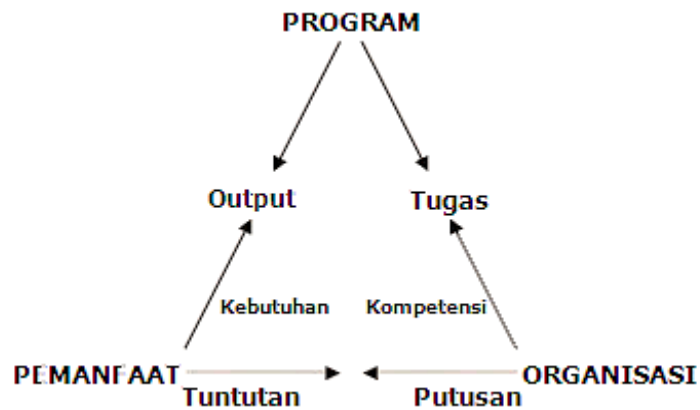
Fasilitasi kemudahan akses permodalan dilakukan Perangkat Daerah Penyelenggara melalui kerjasama dengan perbankan, lembaga pembiayaan atau pihak lainnya. Sehingga peserta yang telah memiliki izin usaha difasilitasi untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari perbankan, lembaga atau pihak lainnya. Tetapi, peserta yang belum memiliki izin usaha bisa mendapatkan akses permodalan dari lembaga atau pihak lainnya.

#### **d) Implementasi Program**

Implementasi program merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan atau proyek di mana konsep atau rencana yang telah digarap secara konseptual atau strategis mulai diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang dengan teliti, termasuk pengalokasian sumber daya yang tepat, penugasan tugas kepada personel yang sesuai, perancangan dan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, penjadwalan yang teratur dan terukur, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan yang dicapai. Selain itu, implementasi juga menjadi waktu di mana terjadi interaksi yang erat antara para pelaksana program dengan berbagai pihak terkait, seperti staf, mitra eksternal, dan masyarakat umum. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan dampak yang diharapkan kepada semua pihak yang terlibat. Di samping itu, dalam proses implementasi, penting untuk memperhitungkan aspek-aspek seperti keberlanjutan, fleksibilitas, dan adaptabilitas agar dapat menghadapi perubahan situasi atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.

Salah satu model implementasi program, yakni model yang diungkapkan oleh Korten (Akib dan Tarigan, 2008) bahwa model ini menggunakan pendekatan pembelajaran proses dan lebih terkenal dengan sebutan model kesesuaian implementasi program.

Representasi dari Model Kesesuaian Korten dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Kesesuaian Implementasi Program Korten

*Sumber:* Akib dan Tarigan (2008)

Korten menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu program tergantung pada kesesuaian dari tiga elemen implementasi program.

- 1) Pertama, keselarasan antara program dan penerima manfaat, di mana program harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (penerima manfaat).
- 2) Kedua, keselarasan antara program dan organisasi pelaksana, di mana program harus sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
- 3) Ketiga, keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, di mana syarat yang ditetapkan organisasi untuk memperoleh hasil program harus sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran program.

Berdasarkan model Korten, tanpa kesesuaian di antara ketiga elemen implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Kesesuaian ini penting agar hasil program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, organisasi pelaksana dapat melaksanakan tugas secara efektif, dan syarat yang ditetapkan dapat

dipenuhi oleh kelompok sasaran, sehingga program dapat berjalan sesuai rencana. Program memiliki manfaat yang ditentukan dari kebutuhan yang mendasari keberadaan program tersebut. Rumusan tujuan program sebaiknya didasarkan pada alasan dan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan serta pelaksanaan program tersebut. Beberapa manfaat adanya program sebagai berikut:

- (a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, program dapat memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- (b) Pemberdayaan Individu dan Komunitas, program yang dirancang dengan baik dapat memberikan dukungan dan pelatihan kepada individu dan komunitas, memungkinkan mereka untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi mereka.
- (c) Pengurangan Ketidaksetaraan, program sering kali diarahkan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.
- (d) Peningkatan Kualitas Hidup, program dapat meningkatkan kualitas hidup peserta dengan menyediakan solusi bagi masalah-masalah spesifik yang mereka hadapi, seperti perumahan, pekerjaan, atau keamanan pangan.

Jadi, program mencakup berbagai tindakan yang dijalankan oleh individu atau instansi dengan harapan mencapai hasil atau memberikan dampak. Sebagai hasil konkret dari perencanaan, program memanfaatkan rencana dan data yang valid, bertujuan merespons rencana terstruktur. Melalui fokus mencapai sasaran dalam perencanaan, program menjadi instrumen kebijakan pemerintah atau lembaga, dilakukan untuk mendapatkan alokasi anggaran dan mencapai tujuan.

Contoh pemerintah yang mencerminkan konsep ini adalah program bantuan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan keuangan kepada keluarga miskin, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan program ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial di kalangan peserta program.

Dengan demikian, implementasi program tidak hanya menjadi tonggak penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan, tetapi juga dalam menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

#### **e) Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan akses dasar kepada individu yang terpinggirkan, baik secara langsung oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan dari individu lain yang memiliki akses setara terhadap peluang-peluang tersebut. Pemberdayaan, yang dikenal sebagai "*empowerment*" dalam bahasa Inggris, dapat diartikan sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada satu individu atau lebih untuk berpikir, berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan terkait dengan pekerjaannya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, singkat, dan mudah. Pemberdayaan mengindikasikan adanya pembagian kekuasaan yang adil, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politis dan kekuatan kelompok yang kurang berdaya, sekaligus memperluas pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil pembangunan. Menurut Priyono dan Pranarka (1996), pemberdayaan mencakup dua makna, yakni memberikan kekuasaan atau otoritas kepada pihak yang

kurang atau belum berdaya, serta memberikan kemampuan dan peluang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan.

Dalam konsep pemberdayaan, individu dianggap sebagai subyek yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Proses pemberdayaan ini menitikberatkan pada memberikan kemampuan kepada masyarakat agar dapat menjadi mandiri, serta mendorong dan memotivasi individu agar memiliki keterampilan atau kapasitas untuk membuat pilihan dalam kehidupannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberdayaan harus diarahkan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang berada dalam ketertinggalan.

Menurut Sumodiningrat (Hatu, 2012), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dengan mengaktifkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Konsep pemberdayaan masyarakat melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dan pihak yang peduli sebagai agen yang memberdayakan.

Menurut Jim Ife (2013), terdapat enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat yang saling berinteraksi secara kompleks. Keenam aspek tersebut adalah:

- 1) Pengembangan sosial: upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat yang melibatkan pembangunan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, memperkuat hubungan antarindividu dan antarkelompok, serta mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi.
- 2) Pengembangan ekonomi: kegiatan untuk meningkatkan kemakmuran dan ketahanan ekonomi masyarakat. Ini termasuk pembangunan keterampilan dan kapasitas untuk menciptakan dan

mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

- 3) Pengembangan politik: pemberdayaan individu dan kelompok untuk berkontribusi dalam proses politik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan.
- 4) Pengembangan budaya: pengembangan kesadaran akan keberagaman budaya, pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai budaya, dan pembangunan keterampilan untuk berinteraksi secara positif dengan budaya yang berbeda.
- 5) Pengembangan lingkungan: kesadaran akan pentingnya alam dan ekosistem, adopsi praktik-praktik ramah lingkungan, dan partisipasi dalam upaya konservasi dan pemulihan lingkungan.
- 6) Pengembangan personal: pertumbuhan dan perkembangan individu dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang individu untuk mencapai potensi penuh mereka, merasa berdaya, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Beberapa dimensi lebih mendasar daripada yang lain; contohnya, banyak orang, terutama orang pribumi, akan menyatakan bahwa pengembangan personal dan spiritual menjadi landasan bagi semua bentuk pengembangan lainnya. Namun, dalam konteks penyusunan model pemberdayaan masyarakat dan pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi di atas dianggap sangat penting. Dalam beberapa kasus, tidak semua dimensi ini akan memiliki prioritas yang sama. Setiap masyarakat akan mengembangkan keenam dimensi ini pada tingkat yang berbeda; sebagai contoh, satu masyarakat mungkin memiliki fondasi ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang aktif, serta identitas budaya yang kuat, tetapi sekaligus memiliki layanan kemanusiaan yang kurang, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah, dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat semacam itu, prioritas utama dalam program pemberdayaan masyarakat

akan tertuju pada pengembangan lingkungan dan dimensi personal dan spiritual. Namun, setiap masyarakat akan memiliki kebutuhan dan gambaran yang berbeda, dan oleh karena itu akan memerlukan prioritas yang berbeda dalam upaya pengembangannya. Namun, yang penting dicatat adalah bahwa keenam aspek pemberdayaan masyarakat tersebut sangat penting, dan untuk mencapai masyarakat yang benar-benar sehat dan berfungsi, diperlukan pencapaian tingkat pengembangan yang signifikan dalam keenam dimensi tersebut secara keseluruhan.

Jadi, Pemberdayaan ialah upaya memberikan akses dan kekuatan kepada individu atau kelompok yang terpinggirkan. Dalam bahasa Inggris, pemberdayaan (*empowerment*) merujuk pada proses memberikan kesempatan kepada individu untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan terkait pekerjaannya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Pemberdayaan juga melibatkan pembagian kekuasaan yang adil untuk meningkatkan pengaruh kelompok yang berdaya terhadap proses dan hasil pembangunan. Sebuah pemberdayaan memberikan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide dan tindakan mereka sendiri, serta membuka akses terhadap sumber daya tersembunyi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Menurut Sumaryadi (Putra, 2018), tujuan pemberdayaan ialah:

- (a) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, rentan, dan kaum kecil.
- (b) Memberdayakan kelompok masyarakat secara sosial ekonomi agar mereka dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pemberdayaan membantu meningkatkan kemandirian individu melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan hidup. Dengan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan komunitas, individu mendapatkan kontribusi nyata dari pemberdayaan. Selain itu,

pemberdayaan berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi dengan memberikan akses untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Pelatihan dan keterampilan yang diberikan oleh pemberdayaan membuka peluang pekerjaan, berpotensi mengurangi tingkat pengangguran, dan menciptakan masyarakat inklusif dan berdaya. Pemberdayaan juga memiliki peran kunci dalam mengurangi tingkat ketidaksetaraan dengan memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya dan peluang. Dengan peningkatan keterampilan sosial dan kepemimpinan, pemberdayaan membantu individu berkontribusi positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, sambil meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka melalui rasa kendali atas kehidupan.

Ada delapan tahapan yang dapat membantu masyarakat mencapai kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan (Sari, et al 2018), seperti berikut:

- (1) Pemahaman dan Kesadaran: tahap awal pemberdayaan melibatkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan penyuluhan, pendidikan, dan informasi untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap potensi dan tantangan di lingkungan sekitar.
- (2) Partisipasi: masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini dapat terjadi dalam berbagai forum, seperti pertemuan komunitas, kelompok diskusi, atau pemilihan umum, memungkinkan mereka memiliki suara dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
- (3) Pengembangan Keterampilan: masyarakat diberdayakan melalui pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup pelatihan dalam bidang seperti

kewirausahaan, pertanian, kesehatan, dan keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

- (4) Akses Terhadap Sumber Daya: pemberdayaan melibatkan memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini dapat mencakup akses ke tanah, modal, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk mencapai kemandirian.
- (5) Pengorganisasian dan Jaringan: masyarakat didorong untuk membentuk organisasi dan jaringan yang memungkinkan mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini dapat berupa kelompok petani, koperasi, atau organisasi masyarakat sipil yang memperkuat solidaritas dan kerjasama.
- (6) Pengambilan Keputusan Bersama: proses pengambilan keputusan bersama melibatkan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan dasar bagi pembuatan keputusan yang lebih inklusif dan adil, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (7) Evaluasi dan Pemantauan: tahap evaluasi dan pemantauan penting untuk mengukur kendala program pemberdayaan. Ini melibatkan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan berkelanjutan dari upaya pemberdayaan.
- (8) Pengembangan Keberlanjutan: pemberdayaan harus dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mengembangkan kapasitas dan keberlanjutan program secara mandiri, sehingga mereka dapat terus berkembang dan mencapai kemandirian dalam jangka panjang.

Untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan, UNICEF pada tahun 1999 mengajukan lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.

1. Kesejahteraan: mencakup tingkat kesejahteraan masyarakat yang dinilai berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Akses: mencakup kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut. Kurangnya akses menjadi hambatan bagi peningkatan kesejahteraan. Ketidaksetaraan dalam dimensi ini disebabkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya di antara individu dari kelas sosial yang berbeda, yang memiliki kekuasaan dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya tersebut bisa berupa waktu, energi, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
3. Kesadaran Kritis: kesenjangan yang hadir dalam kehidupan masyarakat tidaklah merupakan bagian alamiah yang telah ada sejak awal atau semata-mata merupakan keinginan ilahi, melainkan hasil dari struktur sosial yang terbentuk akibat adanya diskriminasi yang melembaga. Pemberdayaan masyarakat pada tingkat ini merujuk pada kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah konstruksi sosial yang bisa dan harus diubah.
4. Partisipasi: pada tingkat ini, pemberdayaan berarti partisipasi masyarakat dalam berbagai lembaga yang ada di lingkungannya. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan mereka tidak diabaikan.
5. Kontrol: mengacu pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pengendalian sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa dengan sumber daya yang tersedia, semua lapisan masyarakat dapat

mencapai kebutuhan dan hak-hak mereka, bukan hanya sekelompok kecil individu berkuasa yang menikmati sumber daya tersebut, melainkan seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

**f) Program Jakpreneur**

Program Jakpreneur, merupakan sebuah inisiatif yang menggabungkan "Jakarta" dengan "Entrepreneur" yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan di wilayah Jakarta, ibu kota Indonesia. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pendidikan, pelaku usaha, masyarakat, dan entitas lainnya juga menunjukkan komitmen untuk memberdayakan para masyarakat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam dunia bisnis. Dengan program ini, pelaku UMKM akan diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan independensi mereka dalam mengembangkan potensi bisnis, melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi, institusi pendidikan, pelaku bisnis, masyarakat, lembaga, dan pihak lainnya.

Sebelum memulai pelatihan, para pelaku UMKM harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran yang memiliki persyaratan pendaftaran peserta seperti wirausaha pemula yang harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai surat pernyataan rencana membuka usaha. Selanjutnya, untuk wirausaha naik kelas mempunyai persyaratan seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, bukti kepemilikan usaha, dan mempunyai surat pernyataan rencana mengembangkan usaha. Manfaat menjadi anggota menurut Jakpreneur.jakarta.go.id (2024), yaitu

- 1) Akses ke Pelatihan dan Bimbingan: Anggota Jakpreneur dapat mengakses pelatihan dan bimbingan dari berbagai sumber, yang membantu dalam pengembangan keterampilan kewirausahaan dan manajemen bisnis.
- 2) Jaringan dan Kolaborasi: Bergabung dengan Jakpreneur memungkinkan anggota untuk memperluas jaringan profesional mereka, berkolaborasi dengan sesama pengusaha, start-up, dan lembaga pendukung bisnis lainnya.
- 3) Dukungan Institusional: Anggota Jakpreneur mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga pendukung lainnya, yang dapat membantu dalam memperoleh akses ke sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis.
- 4) Akses ke Sumber Daya Keuangan: Program Jakpreneur dapat memberikan akses kepada anggotanya untuk mendapatkan sumber daya keuangan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan seperti Bank DKI dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Visibilitas dan Promosi: Sebagai anggota Jakpreneur, bisnis atau usaha anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan visibilitas lebih tinggi melalui promosi yang diselenggarakan oleh program ini, baik secara online maupun offline.
- 6) Peluang Pengembangan Bisnis: Melalui kerja sama dan dukungan dari Jakpreneur, anggota memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut, meningkatkan pangsa pasar, dan menciptakan dampak yang lebih besar dalam ekosistem bisnis Jakarta.

Melalui Jakarta Entrepreneur, para calon wirausahawan DKI Jakarta akan diberikan fasilitas pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari permodalan, pemasaran, perizinan, ide kreatif, laporan keuangan,

penyelesaian persoalan usaha, hingga pelatihan menuju pelaku usaha yang unggul.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada para UMKM DKI Jakarta yang ingin mengembangkan usahanya, Jakarta Entrepreneur berkolaborasi dengan berbagai mitra. Anggota Jakarta Entrepreneur akan dibimbing oleh enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi layanan yang disediakan oleh:

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPKUKM)
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Dinas KPKP)
- (3) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Dinas TKTE)
- (4) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP)
- (5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Dinas Parekraf)
- (6) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Dinas Sosial)

Selain pendampingan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Jakarta Entrepreneur juga menyediakan berbagai fasilitas dan bekerja sama dengan berbagai entitas seperti Bank DKI, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Shopee, Gojek, Tokopedia, Grab, LLDIKTI, dan Bukalapak.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan yang melibatkan berbagai pihak seperti start-up, institusi pendidikan, dan lembaga pembiayaan. Jakarta Entrepreneur dianggap sebagai upaya pemberdayaan ekonomi karena memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkembang melalui kolaborasi dan bantuan dari berbagai entitas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 7, persyaratan untuk mengikuti Program Jakpreneur adalah menjadi penduduk Provinsi DKI Jakarta yang dapat dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Namun, bagi calon pengusaha pemula dan mereka yang ingin meningkatkan kelasnya yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, mereka dapat mendaftar sebagai peserta Jakpreneur dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Berdomisili dan beraktivitas di Jakarta paling sedikit 2 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah.
2. Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.

Melalui kerja sama jangka panjang atau kegiatan lainnya, program ini memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian usaha para masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat sektor ekonomi di Jakarta dan dalam penulisan ini berfokus kepada Program Jakpreneur Kecamatan Pasar Minggu.

## **B. Konsep Kunci**

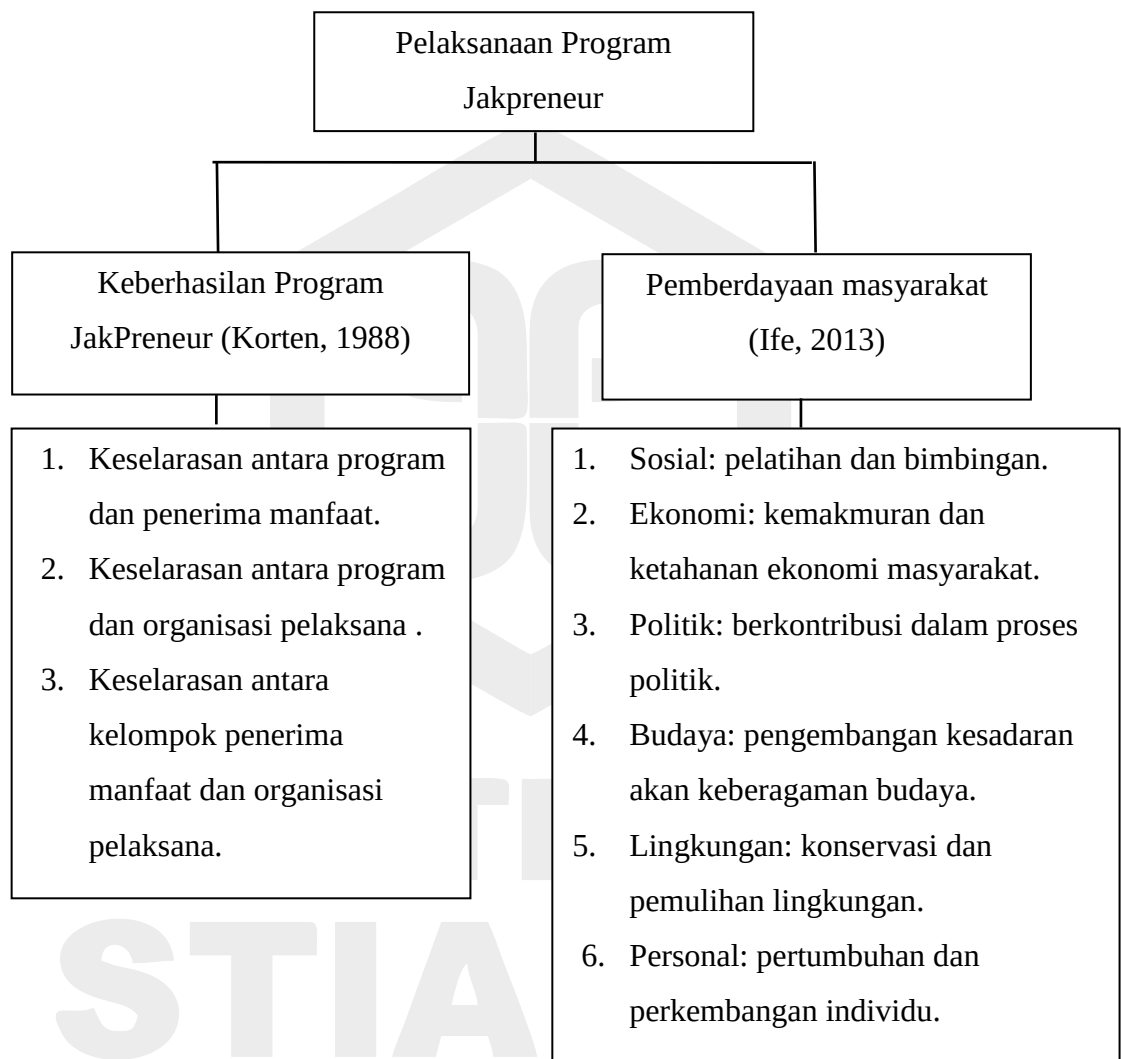
Berdasarkan dari hasil diatas, agar tujuan penelitian tidak meluas serta dapat mudah dipahami dan juga sebagai ruang lingkup dari penelitian. Maka, penelitian ini hanya terbatas pada Pelaksanaan Program Jakpreneur Dalam Pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program, tahap penting dalam siklus kebijakan atau proyek di mana konsep atau rencana strategis diubah menjadi langkah-langkah konkret dalam aktivitas sehari-hari, melibatkan serangkaian langkah yang terencana dengan teliti, termasuk pengalokasian sumber daya yang tepat,

penugasan tugas kepada personel yang sesuai, perancangan dan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, penjadwalan yang teratur dan terukur, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan yang dicapai. Salah satu model implementasi program, menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga elemen implementasi program: keselarasan antara program dan penerima manfaat, keselarasan antara program dan organisasi pelaksana, dan keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana. Tanpa kesesuaian di antara ketiga elemen ini, kinerja program tidak akan mencapai keberhasilan yang diinginkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat, memberikan pengembangan manusiawi dari kelompok rentan, miskin, dan kecil, serta memberdayakan mereka secara sosial ekonomi agar dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian ini menggunakan enam dimensi. Pemberdayaan bertujuan memberikan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan kapasitas, dan menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat aktif dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dan sosial.

### C. Kerangka Berpikir



Program Jakpreneur bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan independensi UMKM di Jakarta melalui kerjasama dengan berbagai pihak, dan keberhasilannya diukur melalui tiga elemen implementasi menurut Korten: keselarasan program dengan penerima manfaat, organisasi pelaksana, serta keselarasan antara penerima manfaat dan organisasi pelaksana. Kesuksesan program ini juga dinilai dari dampaknya pada enam dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Ife: sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal. Dengan memastikan keselarasan elemen-elemen tersebut dan memberikan dampak positif pada dimensi pemberdayaan masyarakat, Program

Jakpreneur dapat mencapai tujuan utamanya dalam memberdayakan UMKM di Jakarta.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ditetapkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana keberhasilan Program JakPreneur di Kecamatan Pasar Minggu?
2. Bagaimana pemberdayaan UMKM pada Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu?

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan realitas dari kejadian yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data objektif, dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan Pelaksanaan Program Jakpreneur Dalam Pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan alasan karena penelitian ini berfokus kepada pemahaman mendalam terhadap Pelaksanaan Program Jakpreneur Dalam Pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasi fenomena secara umum mengenai isu yang diteliti dengan cakupan yang menyeluruh, luas, dan mendalam, khususnya terkait dengan pelaksanaan Program Jakpreneur dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Demi memastikan akurasi, kelengkapan, dan korelevanannya dengan konteks lapangan, peneliti memilih untuk melakukan wawancara, menerapkan teknik observasi dengan seksama, dan studi dokumentasi. Proses ini dirancang untuk menggambarkan dan merekam informasi secara menyeluruh dari berbagai sumber, dengan tujuan mendukung kevalidan dan ketelitian data yang dikumpulkan.

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung atau tidak langsung antara dua belah pihak, yaitu pewawancara yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan memiliki peranan yang sangat vital dalam menangkap fakta, opini, dan perasaan seseorang terkait suatu fenomena, peristiwa, atau masalah yang tengah terjadi. Melalui wawancara, informan dapat berbagi pengalaman mereka dengan peneliti. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teknik wawancara secara langsung, mendalam, dan terstruktur. Untuk pengumpulan sampel dari pegawai Sudin PPKUKM yang diambil hanya 3 orang, dapat digunakan teknik sampel acak sederhana, purposive sampling, atau sampel sistematis; sedangkan untuk pengumpulan sampel dari 8 orang masyarakat UMKM dari 5982, dapat digunakan teknik sampel acak sederhana, stratified sampling, purposive sampling, atau sampel sistematis. Selama interaksi, peneliti dan informan berkomunikasi secara langsung, berhadapan satu sama lain, dan pertanyaan diajukan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini kepada informan.

Tabel 3.1 *Key Informant* dalam Penelitian

| No | Key Informan                                        | Alasan                                                                                         | Inisial |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Kasatpel<br>Jakpreneur<br>Kecamatan Pasar<br>Minggu | Sumber informasi utama dari<br>Program Jakpreneur di Wilayah<br>Kecamatan Pasar Minggu         | KSP     |
| 2  | Analisis Rencana<br>Pengembangan<br>Produk Skala    | Sumber informasi dari Suku<br>Dinas Perindustrian,<br>Perdagangan, Usaha Kecil dan<br>Menengah | ARP     |

|    |                                       |                                                                           |     |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Mikro, Kecil, dan Menengah            |                                                                           |     |
| 3  | Pendamping Binaan                     | Pegawai yang langsung terjun ke lapangan                                  | PB  |
| 4  | Masyarakat Binaan (Mpok Mama Snack)   | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | MMS |
| 5  | Masyarakat Binaan (Pempek Kylan)      | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | PK  |
| 6  | Masyarakat Binaan (Warung Yoshi)      | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | WY  |
| 7  | Masyarakat Binaan (Dapur Firdaus)     | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | DF  |
| 8  | Masyarakat Binaan (Dapur Cing Haji)   | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | DCH |
| 9  | Masyarakat Binaan (Dapur Mamwi)       | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | DM  |
| 10 | Masyarakat Binaan (Moffenson Apparel) | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | MA  |
| 11 | Masyarakat Binaan (Dapur Umika)       | Sebagai perwakilan dari 5.982 binaan dan Pendapatan Informasi yang mudah. | DU  |

## 2. Observasi

Observasi merujuk pada kondisi di mana peneliti secara langsung melakukan pengamatan, bertujuan untuk memahami konteks data dalam situasi sosial secara keseluruhan, sehingga dapat menghasilkan pandangan yang menyeluruh.

## 3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi menjadi aspek kritis dalam mengumpulkan data dan mendokumentasikan berbagai informasi yang terkait dengan implementasi program tersebut. Langkah-langkah dokumentasi, seperti analisis dokumen terkait program, studi pustaka terkini, serta pembahasan mengenai sumber daya tertulis yang digunakan dalam program, dapat memberikan landasan kuat untuk memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan Program Jakpreneur dalam pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Proses dokumentasi juga dapat mencakup catatan mengenai pengalaman peserta, hasil wawancara dengan pihak terkait, dan evaluasi. Dengan demikian, dokumentasi bukan hanya memperkaya kerangka teoretis dan metodologi penelitian, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif.

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan menjadi kunci dalam mendokumentasikan dan menggali informasi terkait dengan "Pelaksanaan Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan." Observasi akan digunakan untuk mencatat sistematis, instrumen wawancara akan membantu mendapatkan wawasan mendalam dari berbagai pihak terkait, dan instrumen dokumentasi akan mencatat dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait penelitian untuk memberikan dasar data yang kaya dan

mendukung analisis temuan penelitian. Dengan menggunakan instrumen-instrumen ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan Program Jakpreneur dan Pemberdayaan UMKM Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, dan Pedoman Studi Dokumentasi.

- a. Pedoman Wawancara, panduan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara sistematis dan terstruktur. Panduan ini berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas selama wawancara, serta instruksi tentang cara mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban, dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dan konsisten dari responden.
- b. Pedoman Observasi, panduan yang digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku di lapangan secara sistematis. Panduan ini mencakup aspek-aspek yang perlu diamati, metode pencatatan data, serta kriteria dan indikator yang digunakan untuk menilai atau menginterpretasi hasil observasi.
- c. Pedoman Studi Dokumentasi, panduan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari dokumen-dokumen yang relevan. Panduan ini mencakup jenis dokumen yang akan dikaji, cara mengakses dan mengorganisir dokumen, serta metode untuk mengevaluasi keaslian, relevansi, dan kredibilitas informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut.

#### **D. Keabsahan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik yang mengkombinasikan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Ketika peneliti menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data, mereka secara bersamaan juga memverifikasi kredibilitas data tersebut.

Artinya, mereka memeriksa keandalan data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi data menurut Sugiyono (2021), merupakan salah satu metode untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengecek kebenaran data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Menurut Sugiyono, ada beberapa jenis triangulasi data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif:

- 1) Triangulasi Sumber, melibatkan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data dari wawancara dengan informan A dibandingkan dengan data dari informan B dan dokumen-dokumen yang relevan.
- 2) Triangulasi Teknik, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengecek keabsahan data seperti data hasil wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi.
- 3) Triangulasi Waktu, mengecek konsistensi data pada waktu yang berbeda seperti data yang diperoleh di pagi hari dibandingkan dengan data yang diperoleh di sore hari atau pada hari yang berbeda.

Sugiyono menekankan bahwa triangulasi bukan hanya tentang penggunaan berbagai sumber data atau teknik, tetapi juga tentang pengecekan kebenaran data melalui perspektif yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat meningkatkan keabsahan data yang dikumpulkan, mengurangi bias, dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif.

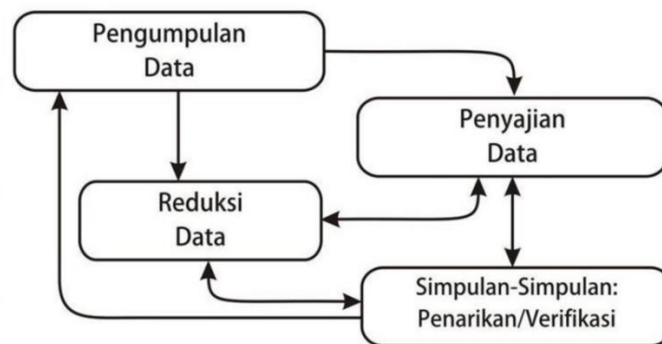
#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Proses pengolahan data merinci langkah-langkah sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini mendetailkan data dalam kalimat terstruktur, berurutan, logis, dan efektif,

untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahapan pengolahan data melibatkan:

- a) Pencatatan Keseluruhan Data, langkah pertama dalam pengolahan data melibatkan pencatatan semua informasi yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait Pelaksanaan Program Jakpreneur. Informasi-informasi ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Penyederhanaan Data, penyederhanaan dilakukan untuk menghilangkan duplikasi dan memastikan kejelasan informasi terkait pelaksanaan program. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempermudah analisis dalam konteks peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- c) Klasifikasi Data, proses ini dilakukan peneliti untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Pemisahan ini mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Program Jakpreneur dan perkembangan usaha masyarakat binaan Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu.
- d) Identifikasi Data, melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan pedoman wawancara terkait pelaksanaan Program Jakpreneur. Fokusnya adalah memastikan informasi yang diperoleh mencerminkan realitas terkini terkait pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pasar Minggu.
- e) Verifikasi Data, Proses ini perlu dilakukan untuk memeriksa dan membuktikan kebenaran informasi terkait pelaksanaan Program Jakpreneur. Peninjauan ulang data-data yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi menjadi langkah kritis untuk menghindari kesalahan dan memastikan akurasi hasil penelitian terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian, analisis data sering melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dari data yang dikumpulkan. Analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang memberikan landasan bagi pembuatan kesimpulan dan temuan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan analisis data model Miles Huberman dalam Rijali (2018), yang melibatkan empat tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.



**Gambar 2.1 Model Analisis Data**

**Sumber: Rijali (2018)**

#### 1) Reduksi Data (*Reduction Data*).

Reduksi data merujuk pada rangkuman, pemilihan informasi inti, fokus pada elemen yang penting, serta penemuan pola dalam data. Proses ini penting dilakukan karena volume data yang dikumpulkan dalam penelitian cenderung besar, sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, jika diperlukan.

#### 2) Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data bertujuan memfasilitasi pemahaman peneliti terhadap informasi yang ditemukan dan merencanakan langkah

selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan awal yang dihasilkan oleh peneliti bersifat sementara. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari pengumpulan data, maka kesimpulan yang dihasilkan menjadi kredibel. Kesimpulan awal yang tidak didasarkan pada bukti yang kuat dapat berubah seiring dengan perkembangan data yang diperoleh oleh peneliti. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan deskriptif yang, melalui penelitian lebih lanjut, dapat berkembang menjadi hubungan kausal, hipotesis, atau teori yang lebih jelas.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **a) Kecamatan Pasar Minggu**

Peneliti memilih lokasi ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Pasar Minggu dikenal dengan pasar tradisionalnya serta berbagai pusat perbelanjaan modern dan bisnis lainnya sehingga sejalan dengan yang ingin diteliti. Sebab, nama "Pasar Minggu" berasal dari pasar yang dahulu hanya buka pada hari Minggu. Sejak zaman kolonial, kawasan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan permukiman penting di Jakarta Selatan.

Kecamatan Pasar Minggu memiliki luas Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 2.169,39 Ha, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Minggu (278,60 Ha), Kelurahan Pejaten Barat (289,79 Ha), Kelurahan Cilandak Timur (352,66 Ha), Kelurahan Ragunan (504,74 Ha), Kelurahan Jati Padang (249,77 Ha), Kelurahan Pejaten Timur (267,83 Ha), dan Kelurahan Kebagusan (226,00 Ha) yang semua terletak di bagian selatan Jakarta, DKI Jakarta. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Pancoran di sebelah utara, Kecamatan Jatinegara di sebelah timur, Kecamatan Jagakarsa di sebelah selatan, serta Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Cilandak di sebelah barat.

##### **b) Satuan Pelaksana Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kecamatan Pasar Minggu**

Satuan Pelaksana Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau selanjutnya disebut PPKUKM merupakan unit organisasi pemerintah yang berada di level kecamatan yang

berfokus pada Program Pengembangan Kewirausahaan. PPKUKM adalah inisiatif pemerintah untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan dukungan pemasaran. Kecamatan Pasar Minggu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar dalam pengembangan UKM, didukung oleh lingkungan yang dinamis dan beragam.

PPKUKM Kecamatan Pasar Minggu merupakan penanggung jawab para UMKM yang ada di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Untuk Struktur Organisasinya mengikuti dari Kantor Kecamatan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pasar Minggu.**

*Sumber: Kecamatan Pasar Minggu (2024)*

Dalam Strukturnya PPKUKM di Kecamatan Pasar Minggu Sebagai Seksi Dinas Kecamatan. PPKUKM di tingkat kecamatan bukanlah milik kecamatan secara administratif, tetapi merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan tersebut. Kecamatan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan PPKUKM seperti memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dan pihak yang menjalankan program, menyediakan tempat untuk

pelatihan, pameran, dan kegiatan lainnya yang mendukung UKM. Pengelolaan dan kepemilikan PPKUKM tetap berada di bawah Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

## **B. Pembahasan**

Pada bagian ini, penelitian Tugas Akhir dimulai pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 6 Juni 2024 dengan mengambil judul tentang Pelaksanaan Program Jakpreneur Dalam Pemberdayaan UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Peneliti akan mendeskripsikan hasil data dan temuan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari responden, yang merupakan individu yang menjadi subjek penelitian. Informasi ini berupa jawaban yang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data dapat diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan responden atau dari sumber utama lainnya. Berbeda dengan data yang telah terkompilasi atau tersedia dalam bentuk file, data hasil penelitian belum diorganisir secara sistematis. Oleh karena itu, peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut langsung dari narasumber. Responden, dalam konteks penelitian, merupakan sumber informasi utama yang memberikan data primer yang esensial untuk analisis lebih lanjut oleh peneliti. Data ini memainkan peran penting dalam memberikan wawasan yang mendalam dan membantu mencapai tujuan penelitian dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan.

Peneliti melakukan pengamatan awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada, peneliti selanjutnya melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan melalui Program Jakpreneur di Kecamatan

Pasar Minggu dengan mewawancarai Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), Analis Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah, Pendamping, dan binaan yang mengikut Program Jakpreneur di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

Peneliti akan membatasi sumber data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan. Data hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model implementasi program yang dirumuskan oleh Korten, serta enam dimensi pemberdayaan masyarakat Menurut Ife (2013).

Peneliti menyoroti situasi pengangguran yang mencolok di Jakarta, sebuah permasalahan yang terus berlangsung seiring waktu. Data empiris tahun 2023 mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 354,49 ribu individu yang mengalami masa pengangguran di ibu kota. Fakta ini menggarisbawahi urgensi perlunya intervensi konkret untuk mengatasi tantangan ini. Di tengah tantangan ini, program-program seperti Jakpreneur, yang didedikasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memfasilitasi pendirian dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), muncul sebagai salah satu solusi potensial. Melalui inisiatif ini, individu yang terpinggirkan dari pasar kerja formal dapat diberikan kesempatan untuk memulai usaha mereka sendiri, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran.

#### **a. Keberhasilan Program Jakpreneur**

##### **1) Keselarasan antara program dan penerima manfaat**

Pada aspek keselarasan antara program dan penerima manfaat, penelitian ini mengacu pada indikator kebutuhan masyarakat setempat, dan saran dari masyarakat.

Hasil temuan dari penelitian ini, terkait indikator kebutuhan masyarakat setempat dalam tantangan utama yang dihadapi secara ekonomi banyak warga yang masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga tingkat

kesejahteraan mereka tetap rendah. Hal ini disampaikan oleh informan KSP, yang menyatakan:

*“Masalah utama masyarakat lebih kearah perekonomian dan pembangunan. Bahwa keberadaan kami salah satunya untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan pembangunan yang ada di kecamatan di pasar minggu adalah dengan melaksanakan pelatihan baik itu soft skill maupun hard skill dimana itu harapannya nanti warga yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi wirausaha itu tantangannya.” (21 Mei 2024)*

PPKUKM memberikan perhatian khusus dan dukungan yang lebih besar di perlukan untuk memberdayakan para binaan, termasuk melalui program pelatihan, akses ke pembiayaan, dan kebijakan yang mendukung inklusi dalam sektor UMKM.

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan KSP, yang menyatakan:

*“Disini masyarakat yang mendaftar itu kebanyakan dari ibu-ibu. Kita memposisikan mereka semua itu sama, sepanjang mereka mau menjadi wirausaha siapapun dia, umurnya berapapun, ekonominya apapun, mau dari orang desa atau orang sini, sepanjang memang mereka ingin menjadi wirausaha kita tidak akan membedakan.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan ARP, yang menyatakan:

*“ada 6 skpd lainnya mengampu Program Jakpreneur jadi sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan posisi masyarakat. Misalnya kita sudin sosial mengampu jakpreneur yang disabilitas. Jadi jakpreneur yang disabilitas bisa dibawa binaannya sudin sosial.” (15 Mei 2024)*

Hasil wawancara tersebut, Program Jakpreneur dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memastikan inklusivitas bagi kelompok rentan seperti perempuan pengusaha, kaum muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan pelatihan yang

sesuai dan memfasilitasi akses ke sumber daya dan modal. Program ini juga perlu memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk memahami lebih baik kebutuhan spesifik dari berbagai lapisan masyarakat, serta menciptakan mekanisme umpan balik yang efektif.

Pernyataan ini sejalan dengan MMS, yang mengungkapkan:

*“Ya, karena Program Jakpreneur ini lebih tepat dan cepat untuk menciptakan peluang usaha.”* (28 Mei 2024)

Pernyataan ini dikuatkan oleh PK, yang berpendapat:

*“Menurut saya sudah sangat responsif sekali.”* (28 Mei 2024)

Lebih lanjut, pernyataan ini dipertegas oleh WY, yang menyatakan:

*“Tidak ada, karena sejauh ini sudah cukup responsif.”* (28 Mei 2024)

Selanjutnya, untuk lebih akurat, pernyataan ini diperjelas oleh DF, yang berkomentar:

*“Tidak ada, soalnya udah responsif juga dari pendampingnya.”* (28 Mei 2024)

Selain itu, informasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan, yang menjelaskan:

*“Sudah sangat responsif karena pihak Jakpreneur sering melakukan bazaar dan bekerja sama dengan instansi pemerintah.”* (28 Mei 2024)

Pernyataan ini juga didukung oleh DM, yang menegaskan:

*“Sangat gampang sih, pendamping juga sangat terbuka juga sama kita”* (28 Mei 2024)

Pernyataan ini sesuai dengan informan DU, yang menyatakan:

*“Selain bazar tidak ada, karena dari segi pelatihannya sudah baik terutama HALAL, HAKI gitu sudah ada.”* (28 Mei 2024)

Kemudian, pernyataan tersebut sedikit bertolak belakang dengan MA, yang menanggapi:

*“Mungkin kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihannya lebih diperbanyak. Baik dari soft skill maupun hard skill perlu diperbanyak dan perizinan-perizinan perlu ditingkatkan seperti ekspor untuk teman-teman yang ingin melakukan ekspor.”* (28 Mei 2024)

Selanjutnya, agar program ini dapat terus berlanjut dan berkembang, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Pernyataan ini sesuai dengan informan MA yang memiliki harapan kepada Program Jakpreneur, yang menyatakan:

*“Saya berharap brand Moffenson ini dapat lebih dikenal apalagi kalau bisa ekspor cita-cita kita yang bisa dibantu pemerintah.”* (28 Mei 2024)

Pernyataan tersebut didukung oleh informan DCH, yang menyatakan:

*“Ada, harapannya melalui Program Jakpreneur ini usaha saya bisa lebih dikenal oleh masyarakat.”* (28 Mei 2024)

Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat oleh informan DF, yang menyatakan:

*“Harapannya karena saat ini sudah lama tidak ada bazaar, keinginan saya bazaar dan event lebih dibanyakin dan diadakan lebih sering. Seingat saya tahun lalu bazaar nya*

*lumayan banyak, tahun ini saya dengar baru 5 kali.” (28 Mei 2024)*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan merasa bahwa Program Jakpreneur telah responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan positif dari beberapa informan yang menganggap program ini tepat waktu dalam menciptakan peluang usaha. Meskipun demikian, beberapa informan menyoroti kebutuhan untuk lebih meningkatkan aktivitas pelatihan dan acara seperti bazaar, serta meningkatkan perizinan untuk mendukung ekspansi usaha, terutama untuk mereka yang berkeinginan melakukan ekspor.

Kemudian, harapan terhadap Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu sangatlah positif, dengan harapan agar program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat, seperti meningkatkan penerimaan dan visibilitas merek usaha lokal.

Berdasarkan hasil data diatas, melalui wawancara dengan berbagai informan dapat dilihat bahwa ketergantungan pada sektor informal dengan pendapatan tidak menentu menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu mendukung kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan program-program seperti Jakpreneur.

Hasil dari ketiga sumber ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara temuan dari wawancara dan dokumen terkait Program Jakpreneur. Temuan dan saran dari wawancara mendukung hasil

regulasi yang ada dalam dokumen mendukung kerangka hukum yang mengatur program-program serupa.

## **2) Keselarasan antara program dan organisasi pelaksana**

Pada aspek keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, penelitian ini mengacu pada indikator SDM, fasilitas yang tersedia untuk program, Tingkat keahlian dan keterampilan staf pelaksana program, pelatihan yang diberikan kepada binaan, keputusan Strategis dalam Pelaksanaan Program, komunikasi dan penyampaian kebijakan.

Hasil temuan dari penelitian ini terkait SDM menunjuk bahwa dalam mendukung Program Jakpreneur terdiri dari tim yang didedikasikan untuk memastikan program ini berjalan efektif. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“Untuk saat ini yang tersedia di kecamatan terdapat 8 orang petugas dari sudin ppukm jakarta selatan” (21 Mei 2024)*

Untuk menjalankan program ini, dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus, seperti kemampuan dalam pelatihan *soft skill* dan *hard skill*, manajemen usaha, serta kemampuan pemasaran. Selain itu, keterampilan dalam berkomunikasi dengan beragam kelompok masyarakat dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan. Hal ini disampaikan oleh KSDP, yang menyatakan:

*“Ada beberapa yang memang dibutuhkan khususnya pengetahuan ya, sebenarnya sih bukan keahlian khusus tetapi lebih kepahamannya saja terkait kan kita ada namanya fasilitas HAKI, HALAL, dan lain sebagainya. Karena, memang itu mungkin hal-hal yang memang perlu diketahui bahwa kalau sertifikasi halal ada hal-hal yang harus dipenuhi seperti semacam edaran yang perlu diketahui oleh pegawai supaya mudah ketika melakukan pelayanan.” (21 Mei 2024)*

Hasil wawancara tersebut, agar dapat menunjang kegiatan pelaksanaan fasilitas dapat memengaruhi partisipasi dan efektivitas program secara signifikan. Ketika fasilitas mudah diakses oleh peserta, baik dari segi lokasi, transportasi, maupun waktu, hal ini akan meningkatkan partisipasi secara keseluruhan. Peserta akan lebih termotivasi untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan program. Selain itu, aksesibilitas yang baik juga mendukung efektivitas program karena peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa hambatan. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“Terkait fasilitas dimana sarana dan prasarana memang disini kita untuk bangunan dan struktur bangunan dibawah kecamatan, jadi memang fasilitas sarana dan prasarana sangat mendukung kenyamanan yang pasti kenyamanan sudah nyaman otomatis yang bekerja baik pelayanan diberikan pun akan mengikuti nyaman juga.” (21 Mei 2024)*

Sarana dan prasarana yang ada sangat mendukung kenyamanan, yang kemudian berpengaruh positif pada kinerja dan kualitas pelayanan. Jika ada kerusakan pada peralatan atau bagian dari bangunan seperti mesin fotokopi atau pintu, hal tersebut akan berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh PB, yang menyatakan:

*“Untuk ruangan kita ini meminjam dari kecamatan, jadi itu bukan milik kita. Kita hanya ditempatkan di kecamatan dan untuk masalah ruangan, meja, kursi, dan semuanya adalah aset kecamatan.” (21 Mei 2024)*

Ketersediaan fasilitas dapat memengaruhi waktu dan lokasi pelaksanaan program secara signifikan seperti pemberian fasilitas yang diberikan oleh Program Jakpreneur untuk binaan.



**Gambar 3.2 Fasilitas Program Jakpreneur di Kantor Kecamatan Pasar Minggu.**

Ketika fasilitas tersedia dan mudah diakses, program dapat dijadwalkan pada waktu yang optimal dan di lokasi yang strategis, yang akan meningkatkan partisipasi dan efektivitas. Sebaliknya, jika fasilitas sulit dijangkau atau tidak memadai, hal ini dapat menyebabkan penundaan, perubahan jadwal, atau pemindahan lokasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dan efektivitas program. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai adalah kunci untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan bahwa:

*“Untuk pelatihan disediakan tempat misalnya dari kecamatan menyediakan tempatnya dan lokasi tersebut kita adakan jauh jauh hari kita booking atau mengajukan permohonan yang menyebabkan juga sedikit kemungkinan dipakai untuk kegiatan selain dari jadwal yang ditentukan, apabila itu terjadi juga kita dapat menghandlenya karena kita ada 7 kelurahan dan kita bisa meminta bantuan 7 kelurahan untuk mendukung kegiatan kita. Karena kegiatan kita ini untuk warga*

*kecamatan pasar minggu yang tersebar di 7 kelurahan dan juga mereka akan mempersiapkan alat alat seperti kursi, meja, dan lainnya untuk mendukung kegiatan kita.” (21 Mei 2024)*

Hasil wawancara diatas, diperlukan kompetensi yang baik para pegawai untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman kerja sebelumnya dan keterlibatan dalam organisasi dari para pelaksana program agar dapat memahami dan menangani masalah yang dihadapi oleh peserta program. Pendamping diberikan pelatihan-pelatihan lagi untuk mendukung kegiatan program. Para pegawai diharuskan selalu meningkatkan dirinya melalui pelatihan yang diberikan seperti para pegawai akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan program dan tuntutan tugas yang dihadapi agar lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan yang ada. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“Karena, kita hanya sebagai pelaksana. Biasanya dari sudin atau dari dinas mengadakan semacam pelatihan peningkatan bagaimana cara menghandel pelayanan yang baik, dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan binaan seperti itu agar ketika ada masalah mereka bisa memecahkan permasalahan tersebut tanpa menimbulkan masalah lagi yang paling penting.” (21 Mei 2024)*

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan PB, yang menyatakan:

*“Pertama untuk basic perekrutan adalah disini memiliki pengalaman kewirausahaan, artinya masing-masing pendamping sebelumnya sudah memiliki usaha. Kedua ada sertifikasi dari bnsn terkait dengan pendamping kewirausahaan.” (21 Mei 2024)*

Staf telah menjalani pelatihan dan pengembangan keterampilan tertentu yang relevan dengan tujuan program, seperti pelatihan

dalam bidang pelatihan *soft skill* dan *hard skill*, manajemen usaha, dan pemasaran. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan menjalankan program dengan lebih efektif, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung para peserta program dalam mencapai kesuksesan wirausaha.

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan PB, yang menyatakan:

*“Jadi dari dinas sendiri itu juga untuk pengembangan sumberdaya pendamping itu juga diberikan pelatihan-pelatihan yang terkait Program Jakpreneur. Tentunya pelatihan yang diberikan memang banyak ini biasanya seperti di akhir tahun kemarin kita ada enam hari khusus pendamping yang khusus dengan Program jakpreneur. Misalnya seperti kita di monoring kembali ya atau di refresh kembali tentang pengelolaan keuangan, terus juga tentang perizinan-perizinan seperti itu. Walaupun kerjaan kita setiap hari tetap masih diberikan lagi sebagai materi agar lebih kuat.”* (21 Mei 2024)

Hasil wawancara diatas terkait pelatihan yang diberikan kepada binaan sebagai berikut. Untuk para binaan pelatihan dirancang dengan cermat untuk memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri binaan. Hal ini disampaikan oleh informan PB, yang menyatakan:

*“Sebenarnya pelatihan offline dengan pelatihan online sama saja, hanya berbeda cara penyampaiannya saja. Kalau mungkin online itu kan melalui zoom gitu, tetapi untuk offline seperti kemarin di kecamatan.”* (21 Mei 2024)

Setiap aspek dari pelatihan dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan individu.

*“Jadi, pelatihan-pelatihan yang dirancang di jakpreneur ini disesuaikan dengan kebutuhan para umkm yang pertama*

*seperti kemarin yang saya sebutkan itu gimana cara memasarkan produk kita secara digital terus kita juga ada pelatihan pembukuan atau pencatatan keuangan seperti itu, terus juga gimana menjual di marketplace itu ada spesifiknya sendiri. Bahkan juga mindset yang soft skill gitu yang mindset menjadi wirausahawan seperti apa itu kita juga ajarkan.” (21 Mei 2024)*

Hasil wawancara diatas mengarahkan jalannya Program Jakpreneur tentunya dipertimbangkan dengan cermat oleh PPKUKM Kecamatan Pasar Minggu. Mereka harus memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“seperti kita memberikan fasilitas HAKI, dimana fasilitas HAKI kebijakannya saat ini adalah tidak boleh difasilitasi HAKI dan HALAL di waktu yang sama. Jadi strateginya itu tadi ketika 2023 ada yang sudah kita fasilitasi, di tahun 2024 ini mereka baru mendapatkan fasilitas HALAL.” (21 Mei 2024)*

Hasil dari wawancara diatas, apabila terjadi perubahan dalam kebijakan atau peraturan disampaikan kepada semua pihak terkait, termasuk staf, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan cara yang efektif dan jelas. Hal ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti email resmi, rapat, pemberitahuan tertulis, serta melalui platform komunikasi internal perusahaan. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami perubahan tersebut, dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan atau peraturan baru, dan terus menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka dengan informasi yang terbaru. Hal ini disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“Kita ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang memang rutin kita adakan setiap tahun dilaksanakan. Ketika ada kebijakan-kebijakan baru yang memang perlu disosialisasikan dan diinformasikan baik kepada perangkat-perangkat yang lain atau SKPD antar instansi, kemudian antar binaan dengan wilayah. Kami memang di setiap tahun itu mengadakan atau ikut sosialisasi yang biasanya ada di kelurahan-kelurahan didalam kegiatan sosialisasi tersebut kita informasikan kegiatan-kegiatan baru, peraturan-peraturan baru, dan tata caranya sehingga itu salah satu sarana kami dalam menyampaikan setiap perubahan-perubahan yang ada.” (21 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut didukung kembali oleh KSP agar komunikasi tersebut efektif, yang menyatakan:

*“Dari kita dalam sosialisasi itu ada diskusi tanya jawab dan juga ada grup wa, nah informasi perubahan atau kebijakan-kebijakan yang baik secara tertulis (surat edar) kita sampaikan disana. Ketika itu sudah kita sampaikan didalam grup atau whatsapp bagi kami itu juga salah satu sarana mensosialisasikan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang baru. Disamping itu kita juga akan ada sosialisasi di kelurahan dan memang ada waktunya dalam kurun setahun kita turun ke kelurahan untuk mensosialisasikan program-program kita. Nah disitu lah ada diskusi dan tanya jawab, kalau dalam wa sifatnya hanya searah tetapi disitu dua arah dimana kami menampung diskusi tanya jawab apa yang kurang jelas mereka bisa tanyakan dan kita bisa jawab. Mungkin cara-cara tersebut adalah menurut kami adalah cara-cara yang efektif dalam mensosialisasikan program kegiatan.” (21 Mei 2024)*

Tujuan komunikasi ini adalah memastikan semua pihak memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan atau peraturan baru, serta menjalankan tugas dengan informasi terbaru. KSP menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi rutin dilakukan setiap tahun di kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan perubahan dan aturan baru. Untuk memastikan komunikasi efektif, KSP juga menggunakan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi

secara tertulis dan mengadakan diskusi tanya jawab saat sosialisasi di kelurahan, sehingga kedua metode ini dianggap efektif dalam mensosialisasikan program dan kegiatan.

Berdasarkan data diatas, hasil wawancara SDM PPKUKM di kecamatan terdiri dari 8 orang petugas dari Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh kecamatan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan program yang dirancang untuk memberikan dampak signifikan pada keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri binaan, mencakup pelatihan offline dan online. Hasil Observasi, aksesibilitas fasilitas yang baik mendukung partisipasi aktif peserta dalam program, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Sebab, pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, termasuk pemasaran digital, pembukuan, dan mindset wirausaha, yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil dokumentasi dari Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ialah peraturan terkait pelatihan dan pengembangan SDM diatur dalam regulasi yang berlaku, memastikan pegawai memiliki kompetensi yang diperlukan dan Peraturan tersebut memberikan arahan tentang pentingnya menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung program kewirausahaan agar materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi perkembangan UMKM.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dan penyediaan fasilitas yang memadai adalah kunci utama dalam keberhasilan Program Jakpreneur. KSP memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi terbaru dan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru melalui sosialisasi rutin dan penggunaan media komunikasi yang tepat.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan staf serta peserta program dirancang untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan program, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketersediaan fasilitas yang baik, dukungan regulasi, dan pelatihan yang relevan meningkatkan partisipasi dan efektivitas program, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

### **3) Keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana**

Pada aspek keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, penelitian ini mengacu pada indikator jumlah pelatihan yang telah diselenggarakan, kesejahteraan masyarakat, peran dan tanggung jawab pelaksana program, dan pembagian tugas diantara staf pelaksana.

Hasil temuan dalam penelitian ini terkait jumlah pelatihan yang telah diselenggarakan dalam periode 2024. Dalam periode 2024, beberapa pelatihan telah dilaksanakan dengan berbagai topik, mulai dari pelatihan *soft skill* dan *hard skill*, manajemen usaha, hingga pemasaran. Setiap pelatihan dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada peserta, membantu mereka mengembangkan kemampuan yang relevan dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Hal ini kemudian disampaikan oleh PB, yang menyatakan:

*“Rencana kita untuk pelatihan soft skill yang tadi sebelumnya seperti digitalisasi marketing, mindset kewirausahaan itu 10 kali pertemuan. Lalu untuk pelatihan hard skill yang sifatnya praktek secara langsung seperti memasak, menjahit, dan kerajinan itu ada 4 kelas yang perkelas nya itu ada 40 yang totalnya ada 160 peserta untuk yang hard skill atau yang praktek secara langsung.” (21 Mei 2024)*

Topik-topik atau keterampilan yang dicakup oleh pelatihan Program JakPreneur di Kecamatan Pasar Minggu mencakup berbagai aspek penting dalam kewirausahaan.

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan PB, yang menyatakan:

*“Sesuai kebutuhan dengan jakpreneur seperti hard skill itu dibagi menjadi 3 kategori Fasion, Kuliner, dan Kerajinan. Contohnya Kerajinan disini langsung praktek membuat tas laptop, sendal yang diberi hiasan. Kuliner juga disini langsung praktek dengan chef. Terakhir untuk Fasion ini menjahit, lalu cara membuat pola dan sebagainya yang diberikan oleh pakarnya secara langsung.” (21 Mei 2024)*

Partisipasi dalam pelatihan Program JakPreneur di Kecamatan Pasar Minggu dievaluasi dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, partisipasi peserta mungkin mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan tingginya minat dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti pelatihan tersebut.

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan PB, yang menyatakan:

*“Untuk partisipasi sejauh ini sesuai dengan yang ditargetkan seperti contoh pelatihan memasak ini pelatihannya belum dimulai tetapi sudah full kuota untuk yang mendaftar. Lalu untuk yang soft skill kemarin itu terkait digitalisasi marketing dari 80 orang kouta yang hadir sebanyak 75 orang dimana cukup mencapai target.” (21 Mei 2024)*

Hasil wawancara tersebut, Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pelatihan dan dukungan yang diberikan, program ini telah memberikan

peluang kepada warga untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam dunia usaha.

Pernyataan ini sejalan dengan MMS, yang mengungkapkan:

“Program ini sangat membantu, terutama dari segi perekonomian tentunya menjadi lebih meningkat dengan adanya program ini.” (28 Mei 2024)

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan PK, yang menyatakan:

*“Sangat membantu dan sangat berkontribusi, karena dengan adanya program ini kita difasilitasi usaha kita sedikit demi sedikit dapat berkembang. Dari mulai legalitas kepengurusan dan segala macamnya itu dibantu.”* (28 Mei 2024)

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari WY, yang menyebutkan:

*“Ya, sangat membantu terutama dari segi pemasarannya semakin meluas, keterlibatan dalam bazaar yang tadinya hanya di satu tempat saja, melalui program ini bisa berkembang.”* (28 Mei 2024)

Pernyataan tersebut didukung oleh informan DM, yang menyatakan:

*“Sangat berkontribusi, karena menambah pemasukan untuk belanja dan kebutuhan sehari-hari.”* (28 Mei 2024)

Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat oleh informan DF, yang menanggapi bahwa:

*“Saat ini yang saya rasakan masih biasa-biasa saja ya, karena kita masih terhalang modal, pemesanan juga sekarang sepi, bisa dikatakan masih sedikit peningkatannya yaitu 50%.”* (28 Mei 2024)

Kemudian, pernyataan ini dipertegas oleh DCH, yang memberikan pandangan bahwa:

*“Program ini sudah berkontribusi terhadap pengelolaan usaha saya, saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman pelaku usaha lainnya, dan saya juga bisa memasarkan produk usaha saya” (28 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut didukung oleh informan DM, yang menyatakan:

*“Sangat berkontribusi, karena menambah pemasukan untuk belanja dan kebutuhan sehari-hari.” (28 Mei 2024)*

Informasi ini juga dikuatkan oleh MA, yang menambahkan:

*“Sangat membantu kita dalam perkembangan bisnis.”*

Hasil wawancara yang dilakukan adalah memastikan pelaksanaan yang efektif dari semua kegiatan yang direncanakan, memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta program, memonitor kemajuan serta hasil dari setiap tahapan program, dan memastikan bahwa semua tujuan program tercapai sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh PB, yang menyampaikan:

*“Dalam Program Jakpreneur kita melaksanakan program-program yang sudah ditentukan dari suku dinas. Contoh kita ada sertifikasi HALAL sebanyak 2 gelombang itu sebanyak 50 orang. Lalu juga HAKI dan juga kita bantu desain logo kemasannya apabila mereka tidak bisa membuat logonya, tentunya disini bersifatnya pelayanannya gratis tinggal masuk keruangannya untuk bertemu pegawai.” (21 Mei 2024)*

Hasil temuan tersebut, tugas-tugas terbagi di antara staf pelaksana program berdasarkan keahlian dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap anggota tim memiliki peran spesifik yang mendukung keberhasilan program secara keseluruhan. Hal tersebut disampaikan oleh KSP, yang menyatakan:

*“Jadi memang di kita ada tiga urusan pemerintahan (perindustrian, perdagangan, koperasi/ukm) memang mereka sudah di awal tahun sudah dibagi dan juga ada dukungan administratifnya. Mereka terbagi di tiga urusan, tetapi masih bersifat dinamis dan fleksibel yang dimana apabila salah satu sektor tersebut membutuhkan bantuan semua akan membantu begitupun sebaliknya. Karena di salah satu sektor tersebut tidak akan mungkin kerja nya padat terus, pasti ada waktu-waktu yang dimana volume pekerjaannya tidak banyak dan bisa membantu sektor lain yang membutuhkan.” (21 Mei 2024)*

Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu menunjukkan keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan yang mencakup *soft skill*, *hard skill*, manajemen usaha, dan pemasaran, yang didukung oleh staf berkompeten yang menjalani pelatihan berkala; kesejahteraan masyarakat meningkat karena program ini membantu mengembangkan keterampilan dan peluang usaha, meski masih ada tantangan seperti modal dan permintaan; pelaksana program memiliki peran penting dalam mendesain dan mengelola pelatihan sesuai kebutuhan peserta, dan pembagian tugas di antara staf dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan dan dukungan yang relevan. Jumlah pelatihan yang telah diselenggarakan mencakup berbagai aspek penting dalam kewirausahaan, membantu peserta mengembangkan keterampilan dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Peran dan tanggung jawab pelaksana program serta pembagian tugas yang fleksibel di antara staf memastikan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Program ini didukung oleh regulasi yang kuat, termasuk

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum dan arahan strategis untuk pelaksanaan dan evaluasi program. Partisipasi aktif masyarakat dan kontribusi program terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dari ketiga data diatas, Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu menunjukkan keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan yang mencakup *soft skill*, *hard skill*, manajemen usaha, dan pemasaran, yang didukung oleh staf berkompeten dengan pelatihan berkala dan fasilitas memadai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski ada tantangan seperti modal dan permintaan, dengan pelaksana program mengambil peran penting dalam desain dan manajemen pelatihan sesuai kebutuhan peserta, serta komunikasi dan kebijakan efektif memastikan program responsif dan diharapkan terus berkembang dengan lebih banyak pelatihan dan event promosi.

#### **b. Pemberdayaan UMKM pada Program Jakpreneur**

##### **1) Sosial**

Pada aspek sosial, penelitian ini mengacu pada indikator interaksi antar individu, kelompok, dan instansi, dukungan antarwirausaha, jaringan sosial yang dibangun.

Hasil temuan terkait interaksi antar individu, kelompok, dan instansi ialah interaksi antara individu yang terlibat dalam program memiliki potensi besar untuk membentuk kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Melalui interaksi yang terjadi, individu dapat saling memahami, membangun kepercayaan, dan menemukan kesamaan

visi atau tujuan. Ini dapat membuka pintu bagi kerja sama yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama program tersebut. Selain itu, interaksi juga memungkinkan adanya pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman antar individu, yang dapat memperkaya perspektif dan memperluas kapasitas tim secara keseluruhan. Hal ini disebutkan oleh ARP, yang menyatakan:

*“Jakpreneur ini ialah program yang dimiliki pihak pemerintah prov dki jakarta, program ini turun dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kota, tingkat kota itu dia berarti dia sampai dengan tingkat rt rw di kelurahan/kecamatan. Caranya sih pengembanaan Program Jakpreneur itu sendiri. Jadi dari tingkat trt rw, kita melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program ini sendiri dan ketika Program Jakpreneur ini fungsinya atau tujuan utama adalah peningkatan atau pembinaan umkm di wilayah provinsi dki jakarta. Kalau saat ini khususnya kota adm jakarta selatan. Untuk interaksi individual sendiri itu selain kita informasi dari provinsi ke tingkat kota. Tapi dari tingkat rt rw pun kita kolaborasi juga terkait dengan pelaksanaan Program Jakpreneur ini sendiri.” (15 Mei 2024)*

Kemudian, ARP menambahkan informasi, yang menyatakan:

*“Masyarakat itu ga akan tau program itu ada untuk memberikan kebutuhan dari masyarakat. Nah sebenarnya di tingkat rt rw ada musrenbang, dari musrenbang itu kebutuhan umkm kita penuhi melalui Program Jakpreneur ini sendiri. Jadi semua umkm dia sudah punya usaha tapi belum ada pembinaan dari pemerintah, baik dalam peningkatan kapasitasnya atau pengembangan produksinya. Nah dari tingkat musrenbang naik ke tingkat kota lalu naik ke tingkat provinsi. Nah kita dari tingkat kota yang melaksanakan kegiatan jakpreneur di tingkat kota. Untuk pertukaran ide, jadi jakpreneur ini diampunya tidak hanya sudin ppkum dki jakarta, tapi ada 6 skpd lainnya mengampu Program Jakpreneur jadi sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan posisi masyarakat.” (15 Mei 2024)*

Program ini turun dari tingkat provinsi hingga tingkat kota, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW di kelurahan/kecamatan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah

Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Interaksi individu dalam program ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga tingkat RT dan RW. Program ini tidak hanya diinformasikan dari provinsi ke tingkat kota, tetapi juga melibatkan kolaborasi di tingkat RT dan RW terkait dengan pelaksanaannya. Masyarakat sendiri mungkin tidak mengetahui keberadaan program ini, namun kebutuhan UMKM dipenuhi melalui program ini, terutama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT dan RW.

Dari tingkat Musrenbang, kebutuhan UMKM diteruskan ke tingkat kota, kemudian ke tingkat provinsi. Program Jakpreneur dilaksanakan di tingkat kota dengan melibatkan berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan posisi mereka dalam ekosistem UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan program untuk memastikan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

Hasil temuan terkait dukungan antarwirausaha ialah dalam program ini, wirausaha mendapatkan dukungan yang komprehensif, termasuk pendampingan personal, pelatihan keterampilan, serta akses ke sumber daya lain seperti modal usaha atau fasilitas infrastruktur. Pendampingan personal memungkinkan para wirausaha untuk mendapatkan bimbingan dan arahan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, sedangkan pelatihan keterampilan membantu mereka meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek bisnis seperti manajemen, pemasaran, dan keuangan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ARP, yang menyatakan:

*“Untuk Program Jakpreneur ini kami sudah berusaha untuk godok sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan dari masyarakat itu paling tidak kita penuhi. Jadi Program Jakpreneur ini kan diketahui kita ada 7 langkah pelaksanaan program dari P1 sampai P7 (Pendaftaran, Pendampingan/ Pembinaan, Pelatihan, Perizinan, Pelaporan Keuangan, Pemasaran, Akses Permodalan) jadi kita harapkan jakpreneur ini itu juga ada 2 binaan jakpreneur yang pertama masyarakat yang sudah punya usaha yang ingin mengembangkan atau masyarakat yang ingin membuat atau merintis usahanya. Jadi kita punya 2 kriteria umkm jadi diharapkan seluruh program kami P1 sampai P7 dapat memenuhi kebutuhan dari umkm itu tersebut.” (15 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut menggambarkan upaya yang dilakukan dalam mengelola Program Jakpreneur agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Program Jakpreneur memiliki tujuh langkah pelaksanaan, mulai dari Pendaftaran hingga Akses Permodalan (P1 sampai P7). Harapannya adalah agar program ini dapat menjadi wadah bagi dua kriteria UMKM, yaitu masyarakat yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya, serta masyarakat yang ingin memulai atau merintis usaha baru. Dengan demikian, seluruh rangkaian program, dari tahap P1 hingga P7, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kedua kriteria UMKM tersebut.

Selain itu, kolaborasi antara wirausaha juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis masing-masing. Melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya, wirausaha dapat saling memperkuat kekuatan mereka dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh ARP, yang menyatakan:

*“Kita memang masih mengharapkan, ada binaan-binaan yang sudah bisa berdiri sendiri(naik kelas) dengan tingkat produksi yang sudah mumpuni, pendapatan yang sudah cukup. Kami masih mengharapkan mereka yang mengikuti program ini sampai maju itu bisa memberikan inspirasi atau tata cara giat giat kepada umkm baru. Nah sampai dengan saat ini kalau ga salah di jakarta selatan sendiri kalau kelompok gitu sudah dibuat secara mandiri secara masing masing jakpreneur yang sudah tempat sharing session tiap tahunnya untuk temen temen umkm. Tapi lagi lagi itu kan jadi bentuk bentuk program kami kan bantu pembinaan jadi memang kami memberikan fasilitas yang dapat memanfaatkan masyarakatnya dan tidak bisa hanya pemerintah saja yang bergerak saja tetapi dari umkm yang memang mau ingin maju dan ingin memanfaatkan fasilitas yang diberikan.” (15 Mei 2024)*

Berdasarkan data diatas, harapannya terhadap para peserta Program Jakpreneur, yaitu agar mereka dapat berkembang hingga dapat berdiri sendiri dengan tingkat produksi dan pendapatan yang memadai. Harapannya adalah bahwa mereka yang berhasil maju melalui program ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan panduan kepada UMKM baru. Di Jakarta Selatan, sudah ada kelompok-kelompok yang secara mandiri mengadakan sesi berbagi pengalaman untuk teman-teman UMKM setiap tahunnya. Ini merupakan wujud dari program pembinaan, di mana pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memanfaatkannya, sambil mendorong peran aktif dari UMKM yang ingin maju dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Hasil temuan terkait jaringan sosial yang dibangun ialah program tersebut memberikan dukungan dan kesempatan bagi peserta program, mentor, pemangku kepentingan, dan pihak lainnya untuk membangun jaringan sosial yang kuat. Melalui berbagai kegiatan, seperti lokakarya, forum diskusi, dan pertemuan networking, para peserta dapat saling berinteraksi, bertukar pengalaman, dan membangun hubungan yang saling mendukung. Akan tetapi, dalam

pelaksanaannya pemerintah hanya sebagai fasilitator. Hal ini disampaikan oleh ARP, yang menyatakan:

*“Jadi kalau program kolaborasi itu banyak nih akademisi baik itu perusahaan punya program untuk program pengembangan mereka sendiri. Jadi kami selaku pembina umkm kita itu sebagai isolator, jadi akademisi dengan perusahaan mempunyai csr untuk inkubasi program pembinaan umkm nah kita sebagai isolator menyambungkan antara pemilik inkubasi ini dengan orang yang membutuhkan. Jadi itu salah satunya, selain itu kan program kita juga ada dari pembinaan sampai akses permodalan tadi yang disampaikan sebelumnya.” (15 Mei 2024)*

Artinya Pemerintah sebagai pembina UMKM bertindak sebagai penghubung atau "isolator" antara akademisi dan perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk inkubasi program pembinaan UMKM. Pemerintah memfasilitasi koneksi antara pemilik program inkubasi dengan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Selain itu, program pemerintah mencakup berbagai tahap, mulai dari pembinaan hingga akses permodalan, yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bertindak sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM, sehingga menciptakan sinergi yang bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM.

Program Jakpreneur telah berhasil membangun interaksi sosial yang kuat antara individu, kelompok, dan instansi, mulai dari tingkat provinsi hingga RT/RW, serta menyediakan dukungan komprehensif bagi wirausaha melalui tujuh langkah pelaksanaan, dari Pendaftaran hingga Akses Permodalan (P1 sampai P7). Dukungan ini mencakup pendampingan personal, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya seperti modal usaha atau fasilitas infrastruktur, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No 2

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Selain itu, program ini mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarwirausaha, serta membangun jaringan sosial yang kuat melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya dan forum diskusi.

## **2) Ekonomi**

Pada aspek ekonomi, penelitian ini mengacu pada indikator pertumbuhan pendapatan rumah tangga, akses ke modal usaha.

Hasil temuan penelitian ini terkait pertumbuhan pendapatan rumah tangga ialah partisipasi dalam program telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Melalui program ini, peserta mendapatkan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif. Dengan meningkatnya kemampuan dan akses terhadap sumber daya, banyak peserta program yang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Ini menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan ekonomi peserta, membantu mereka mencapai stabilitas finansial yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh MMS, yang menyatakan:

*“Ada, program ini membantu meningkatkan omset penjualan saya, karena didalam program ini ada pelatihan dan pendampingan yang diberikan, jadi saya dapat belajar cara mengelola usaha yang lebih efektif, dan saya mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan jejaring bisnis yang lebih kuat.” (28 Mei 2024.)*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan PK, yang menyatakan:

*“Ada, kurang lebih 75-80% pendapatan saya meningkat melalui Program Jakpreneur ini.”* (28 Mei 2024.)

Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat oleh informan WY, yang menyatakan:

*“Program ini meningkatkan omset penjualan saya, berhubung saya bergabung dengan program ini dari tahun 2017, peningkatan yang saya rasakan bahkan bisa sampai 100%.”* (28 Mei 2024.)

Selanjutnya, agar pernyataan tersebut lebih akurat ditambahkan DM, yang menyatakan:

*“Pastinya, karna saya bergabung tahun 2018 apalagi saya bervariasi jualannya meningkat dalam segi omset sebanyak 100 persen.”* (28 Mei 2024)

Wawancara ini menyoroti dampak positif yang dirasakan oleh para peserta Program Jakpreneur terhadap usaha mereka. Benang merah yang dapat ditarik dari pernyataan mereka adalah bahwa program ini telah berhasil meningkatkan omset penjualan dan pendapatan mereka secara signifikan. Hal ini terjadi karena adanya berbagai pelatihan, pendampingan, dan akses yang diberikan oleh program, yang memungkinkan para peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola usaha mereka, mengakses pasar yang lebih luas, dan memperkuat jejaring bisnis mereka. Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa hampir semua peserta mengalami peningkatan omset penjualan atau pendapatan mereka setelah bergabung dengan Program Jakpreneur.

Hasil temuan penelitian ini terkait akses ke modal usaha ialah program ini memberikan kesempatan bagi pesertanya untuk mengakses modal usaha yang mungkin sulit mereka peroleh secara mandiri. Dengan adanya akses ke modal usaha, peserta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Modal usaha dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian bahan baku, investasi dalam peralatan atau teknologi baru, atau bahkan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini didukung oleh pernyataan PB, yang menyatakan:

*“Ada, kita ada akses permodalan bagi peserta. Akses permodalan ini berupa uang, jadi kita sebagai fasilitator hanya menjembatani antara binaan dengan yang memberikan permodalan dalam hal ini Bank DKI karena kita bekerjasama dengan Bank DKI. Kita hanya menjembatani, untuk analisa diberikan atau tidaknya itu dari pihak Bank atau pihak ketiga. Jadi, mereka bisa mendapatkan permodalan tanpa agunan walaupun terbatas jumlahnya sekitar diawal sebanyak 10 juta.” (21 Mei 2024)*

Program tersebut menyediakan akses permodalan bagi pesertanya. Akses permodalan ini berbentuk uang, dan pemerintah sebagai fasilitator hanya bertindak sebagai perantara antara peserta program dan pihak yang memberikan permodalan, dalam hal ini Bank DKI. Meskipun pemerintah hanya menjembatani, keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan permodalan tetap berada di tangan pihak Bank atau pihak ketiga lainnya yang melakukan analisis terhadap permohonan tersebut. Peserta dapat memperoleh permodalan tanpa agunan, meskipun jumlahnya terbatas, yaitu sekitar 10 juta pada tahap awal.

Adanya akses ke modal usaha juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menjalankan usaha mereka, karena mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi tantangan

dan mengambil peluang. Hal ini disampaikan oleh PB, yang menyatakan:

*“Sangat mempengaruhi, sebab dengan adanya modal ini membuat mereka berkembang yang dimana sebelumnya hanya berjualan secara tradisional dan setelah mendapatkan modal mereka dapat melebarkan usahanya lagi dengan contohnya membuat logo, banner, tempat baru, dan promosi di media sosial.” (28 Mei 2024)*

Ketersediaan modal memungkinkan peserta untuk melakukan perluasan usaha yang sebelumnya terbatas pada model tradisional. Dengan adanya modal, mereka dapat mengambil langkah-langkah progresif seperti membuat logo dan banner untuk branding yang lebih profesional, membuka lokasi baru untuk memperluas jangkauan pasar, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa modal tidak hanya memberikan dorongan finansial, tetapi juga memungkinkan peserta untuk mengambil langkah-langkah strategis yang lebih maju dalam mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Jakpreneur memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi peserta, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan rumah tangga dan akses ke modal usaha. Para peserta mengungkapkan bahwa melalui program ini, mereka mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya yang membantu meningkatkan omset penjualan dan pendapatan mereka secara substansial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, yang menekankan pentingnya dukungan modal dan pengembangan keterampilan bagi pengusaha. Dalam konteks ini, akses permodalan yang disediakan oleh program, meskipun terbatas, memberikan dorongan penting

bagi peserta untuk mengembangkan usaha mereka, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa modal tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan perluasan usaha yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dengan demikian, Program Jakpreneur tidak hanya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi individu, tetapi juga sesuai dengan regulasi yang mengatur pengembangan kewirausahaan terpadu di tingkat provinsi.

### **3) Politik**

Pada aspek politik, penelitian ini mengacu pada indikator keterlibatan wirausaha dalam forum kebijakan publik, dukungan dari pemerintah daerah untuk wirausaha lokal.

Hasil temuan penelitian ini terkait keterlibatan wirausaha dalam forum kebijakan publik ialah terdapat forum-forum atau mekanisme formal yang disusun untuk memfasilitasi keterlibatan wirausaha dalam proses pembuatan kebijakan publik. Melalui forum-forum ini, wirausaha memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kepentingan mereka kepada para pembuat kebijakan, serta berpartisipasi dalam diskusi dan perumusan kebijakan terkait isu-isu ekonomi dan bisnis di tingkat lokal. Mereka dapat menyampaikan pengalaman lapangan, tantangan, dan kebutuhan yang dihadapi dalam menjalankan usaha mereka, sehingga memberikan sumbangan berharga dalam proses pengambilan keputusan.

Pernyataan ini sesuai dengan PK, yang menyatakan:

*“Kembali lagi pada pihak Jakpreneur, kalau memang mereka memfasilitasi untuk adanya kita berkontribusi dalam event pasti pelaku usaha akan ikut berpartisipasi. Selain itu pihak*

*Jakpreneur sering membuka forum diskusi juga, biasanya dilakukan di RPTRA. Sudah beberapa kali kita sering mengadakan diskusi di RPTRA Belimbing, RPTRA Jati Padang, RPTRA Sentiong.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut didukung oleh DM, yang menyatakan:

*“Kalau isu-isu gitu sih kita biasanya ngomong sama sesama temen binaan dan sama pendamping saja.” (28 Mei 2024)*

Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat oleh MA, yang menanggapi bahwa:

*“Kita diskusi secara langsung dengan teman-teman suka ada, biasanya sih kita lebih ke arah konseling saat kita ada masalah terkait bisnis agar menemukan jalan keluar terkait permasalahan kita.” (28 Mei 2024)*

Selanjutnya, agar pernyataan tersebut lebih akurat ditambahkan DU, yang menyatakan:

*“Biasanya kita ada semacam dialog antar ukm baik diundang oleh pemerintah dan swasta supaya usaha kita berkembang.” (28 Mei 2024)*

Benang merah yang dapat ditarik dari wawancara ini ialah diskusi antara para pelaku usaha, pendamping, dan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi tantangan dalam menjalankan bisnis. Dari pernyataan para informan, terlihat bahwa mereka cenderung mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi melalui diskusi dengan teman-teman sejawat, dan pendamping. Diskusi ini dapat terjadi secara langsung atau melalui platform digital seperti grup WhatsApp. Selain itu, beberapa narasumber juga menyebutkan adanya forum diskusi yang diselenggarakan oleh pihak Jakpreneur atau pemerintah, yang menjadi kesempatan bagi

para pelaku usaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan keberhasilan bisnis mereka.

Hasil temuan terkait dukungan dari pemerintah daerah untuk wirausaha lokal ialah pemerintah memberikan berbagai jenis dukungan kepada wirausaha lokal sebagai upaya untuk memperkuat sektor bisnis lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dukungan tersebut meliputi insentif fiskal, seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak untuk usaha-usaha lokal yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini di dukung oleh KSP, yang menyatakan:

*“Kalau fiskal sendiri sebenarnya langsung kementerian keuangan jadi otomatis tidak ada di kami. Tetapi kami itu untuk P1 sampai P7 kita bantu mereka memfasilitasi mereka untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang tujuan akhirnya peningkatan kapasitas dari umkm tersebut terus perizinan pun kami memberikan pendampingan bahkan di kami itu punya program 1 tahun untuk fasilitas HAKI, HALAL, BPOM. Jadi temen temen umkm tidak hanya dibekali sama kapasitas yang meningkat, tetapi kita bantu perizinannya. Karna perizinan ini berdampak ya pada hasil omset mereka itu sendiri, makin mereka dapat dipercaya masyarakat berarti nanti kan harapannya adalah peningkatan dari produksi umkm itu sendiri trus kami bantu proses pemasaran, nah pemasaran itu tidak hanya secara offline atau bazar. Bazar kita ada tingkatnya (kecamatan, kota, nasional, sampai internasional) itu tergantung dari umkm tersebut. Untuk onlinenya kita punya jumat beli lokal bekerjasama dengan tokopedia untuk memasarkan produk-produk binaan.” (15 Mei 2024)*

Dalam wawancara ini, informan menjelaskan peran dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka menyatakan bahwa secara fiskal, kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan pajak dan keuangan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, bukan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, pemerintah daerah memberikan berbagai fasilitas dan

dukungan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mendukung pertumbuhan UMKM. Dukungan ini meliputi fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, pendampingan dalam proses perizinan, serta program-program untuk memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), sertifikasi halal, dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**LAMPIRAN KETETAPAN HALAL**

Nama Perusahaan : PEMPEK KYLEN  
Alamat Perusahaan : KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG RI BLOK C NO. 6 RT 3 RW 3 KEL. PASAR MINGGU, KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA  
Nama Fasilitas : PEMPEK KYLEN  
Alamat Fasilitas : KOMPLEK KEJAKSAAN AGUNG RI BLOK C NO. 6 RT 3 RW 3 KEL. PASAR MINGGU, KEC. PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA, INDONESIA

Jenis Produk : IBAN DAN PRODUK PERIKANAN, TERMASUK MOLUSKA, KRUSTASE, DAN EKHINODERMATA DENGAN PENGOLAHAN DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGKAT (FISH AND FISHERY PRODUCTS, INCLUDING MOLLUSCA, CRUSTACEAN, ECHINODERMATA WITH PROCESS AND ADDITIVES)

Nama Produk :

| No | Nama Produk                     | Tipe Produk |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1  | Pempek Kipat Selam Pempek Kylen | Pempek      |
| 2  | Pempek Lempur Pempek Kylen      | Pempek      |
| 3  | Pempek Telur Kecil Pempek Kylen | Pempek      |
| 4  | Pempek Adas Pempek Kylen        | Pempek      |
| 5  | Pempek Kulit Pempek Kylen       | Pempek      |
| 6  | Takwan Pempek Kylen             | Pempek      |
| 7  | Pempek Tahu Pempek Kylen        | Pempek      |
| 8  | Lakon Pempek Kylen              | Pempek      |

Dikeluarkan di Jakarta pada : 14 DESEMBER 2022  
Berlaku sampai dengan : 13 DESEMBER 2026

Ketua MUI Bidang Fatwa :   
Ir. H. M. ASRORUN N'AM SHOLEH, M.A.

Lembaga Pemeriksa Halal IPPOM MUI :   
Ir. HJ. MUTI ARENTAWATI, M.Si.

**Gambar 3.3 Sertifikasi Halal.**

Pendampingan perizinan dan program-program tersebut dianggap penting karena berdampak langsung pada peningkatan omset usaha UMKM, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga membantu dalam proses pemasaran produk UMKM, baik melalui kegiatan offline seperti pameran atau bazar tingkat kecamatan, kota,

nasional, dan internasional, maupun melalui platform online seperti kerjasama dengan situs e-commerce seperti Tokopedia melalui program "Jumat Beli Lokal". Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan holistik bagi UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas hingga pemasaran produk, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM secara keseluruhan.

Lalu, ada juga upaya untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal mencakup berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk meningkatkan potensi ekonomi di tingkat lokal. Pernyataan ini didukung oleh KSP, yang mengatakan:

*“Ada, kita itu membuka kolaborasi baik dari pihak swasta maupun pemerintah lainnya seperti kemendagri dan kemenperin itu kita kolaborasi setiap memang ada wadah umkm itu berkembang sebisa mungkin kita memfasilitasi umkm, nah kita tuh sampai kecil-kecil seperti membantu para binaan yang tidak bisa membuat gambar desain merk desain, kita tuh bisa fasilitasin mereka buat bantu membuat desain gambarnya.” (15 Mei 2024)*

Pihak yang terlibat dalam Program Jakpreneur, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam berbagai aspek, termasuk membantu dalam hal desain dan branding produk. Bahkan, pemerintah daerah turut aktif dalam memberikan bantuan kepada UMKM yang mungkin kesulitan dalam membuat desain gambar atau merk untuk produk mereka. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai pihak untuk membantu UMKM berkembang, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam setiap aspek bisnis mereka, mulai dari desain produk hingga proses branding.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Jakpreneur berperan penting dalam memfasilitasi keterlibatan wirausaha dalam forum kebijakan publik di tingkat lokal. Informasi dari para narasumber menunjukkan adanya forum-forum dan mekanisme formal yang diselenggarakan oleh pihak Jakpreneur di RPTRA Belimbing, RPTRA Jati Padang, dan RPTRA Sentiong, serta forum diskusi lainnya yang diadakan secara berkala. Para wirausaha dapat menggunakan forum ini untuk menyampaikan pandangan mereka, memberikan masukan terkait isu-isu ekonomi dan bisnis, serta berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, wawancara juga mengungkap bahwa para wirausaha cenderung berdiskusi secara informal dengan sesama binaan dan pendamping untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini menggambarkan komitmen Program Jakpreneur dalam mendukung keterlibatan aktif wirausaha dalam pembuatan kebijakan publik, sesuai dengan tujuan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang menekankan pentingnya partisipasi dan dukungan terhadap pengusaha lokal dalam pengambilan keputusan kebijakan.

#### **4) Budaya**

Pada aspek budaya antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, penelitian ini mengacu pada indikator pemanfaatan teknologi dalam promosi budaya lokal, dan integrasi budaya dalam strategi pemasaran usaha.

Hasil temuan penelitian ini terkait pemanfaatan teknologi dalam promosi budaya lokal ialah teknologi digunakan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal melalui berbagai

cara, termasuk platform daring, media sosial, dan aplikasi pemandu wisata. Platform daring memungkinkan penyebaran informasi budaya secara luas dan mudah diakses, sementara media sosial membantu dalam menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam dengan konten yang menarik dan interaktif.

Pernyataan ini sesuai oleh MMS, yang menyatakan:

*“Untuk media sosial biasanya saya melakukan promosi dan menjual produk melalui E-Commerce, namun saya lebih sering promosi melalui bazaar-bazaar yang disediakan oleh program ini karena menurut saya sangat berpengaruh untuk mencapai target penjualan saya yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari PK, yang menyebutkan:

*“Ya betul, karena sekarang era nya digital ya, jadi kita segala sesuatunya baik dari usaha kuliner ikut mempromosikannya ke media sosial seperti Instagram, Tik Tok, Facebook, dan kita punya channel sendiri di Youtube.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan ini sejalan dengan DF, yang mengungkapkan:

*“Saya lebih aktif mempromosikan produk usaha saya di Instagram, Facebook, dan Whatsapp Business, serta Warung saya ini juga tertera di GoFood.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan ini dikuatkan oleh DCH, yang berpendapat:

*“Saya menggunakan Instagram, Whatsapp Business, untuk mempromosikan produk usaha saya.” (28 Mei 2024)*

Pernyataan ini juga didukung oleh DF, yang menegaskan:

*“Sudah, kita ada di facebook dan wa bisnis untuk meningkatkan pemasaran.” (28 Mei 2024)*

Selanjutnya, agar pernyataan tersebut lebih akurat, ditambahkan beberapa klarifikasi oleh DM, yang menyatakan:

*“Saya belum pakai aplikasi seperti gojek, grab, dan lainnya tetapi lebih aktif di whatsapp by order untuk pemesanannya.”*  
(28 Mei 2024)

Namun, menurut WY menyatakan bahwa mereka belum aktif dalam mempromosikan produknya melalui digital, Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat dengan sedikit keraguan oleh WY, yang menanggapi bahwa:

*“Saya kurang aktif untuk mempromosikan produk di media sosial, karena saya lebih aktif dan senang ketika berpartisipasi dalam Bazaar dan event.”* - WY/28 Mei 2024.

Sedangkan menurut informan MA, yang menyatakan:

*“Kalau di jakarta lebih ke betawi, kita mengaplikasikannya pada ornamen-ornamen seperti ondel-ondel ciri khas nya pada festival bongsang.”* - MA/28 Mei 2024.

Secara keseluruhan, teknologi memainkan peran penting dalam mendukung upaya promosi dan pemasaran produk-produk lokal. Penggunaan media sosial dan platform digital memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk mereka secara lebih efektif. Namun, partisipasi dalam bazar dan event langsung tetap dianggap penting oleh beberapa pelaku usaha sebagai sarana untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Integrasi elemen budaya lokal dalam promosi dan

produk juga menjadi cara untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya setempat.

Didukung juga oleh strategi pemasaran usaha melalui berbagai cara, seperti melalui branding, desain produk, dan pengalaman pelanggan yang dinyatakan oleh informan PB:

*“Kita dalam budaya lokal mungkin lebih diutamakan itu budaya betawi yang kita angkat. Jadi ada beberapa pameran atau bazar yang memang lebih kearah keunggulan produk lokal seperti dodol ataupun kembang goyang yang kita lebih angkat. Tapi dalam satu tahun ada event di walikota yang diutamakan produk lokal yang ciri khas gitu.” (21 Mei 2024)*

Hasil temuan penelitian ini terkait integrasi budaya dalam strategi pemasaran usaha ialah Pendamping hadir untuk para binaan juga agar dapat mempromosikan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas merek usaha yang informan PB nyatakan bahwa:

*“Jadi ini kita bantu ya, ada usaha dodol gitu atau kerak telur itu kita bantu mulai dari logonya atau desain logo apabila mereka belum mempunyai desainnya kita buat dan kemasan kurang bagus kita bantu.” (21 Mei 2024)*

Berdasarkan data diatas, dalam mempromosikan budaya lokal, khususnya budaya Betawi, ada penekanan khusus pada produk-produk unggulan lokal seperti dodol dan kembang goyang. Beberapa pameran atau bazar diselenggarakan untuk menonjolkan produk-produk khas ini, dan setiap tahun ada event di kantor walikota yang khusus memfokuskan pada produk-produk lokal yang memiliki ciri khas.

Untuk mendukung usaha-usaha lokal ini, bantuan diberikan mulai dari desain logo hingga kemasan produk. Misalnya, usaha dodol atau kerak telur yang belum memiliki desain logo atau kemasan yang menarik akan dibantu untuk meningkatkan tampilan produk mereka. Ini mencakup pembuatan logo dan perbaikan kemasan agar produk lebih menarik dan kompetitif di pasar. Dengan demikian, usaha-usaha ini tidak hanya mempromosikan produk mereka tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal melalui tampilan dan presentasi yang lebih profesional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Jakpreneur berhasil memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal, khususnya budaya Betawi, melalui berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi pemandu wisata. Para pelaku usaha lokal menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business untuk mempromosikan produk mereka secara efektif kepada audiens yang lebih luas. Strategi ini membantu mereka meningkatkan visibilitas produk dan interaksi dengan pelanggan potensial, serta memperkuat identitas budaya dalam pemasaran mereka. Namun, sebagian informan juga menyoroti pentingnya partisipasi dalam bazar dan event langsung sebagai strategi tambahan untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Integrasi elemen budaya lokal, seperti dalam desain logo dan kemasan produk, juga ditekankan untuk memperkuat identitas merek usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. Dukungan ini sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diutamakan dalam Program Jakpreneur, yang mengangkat budaya Betawi melalui promosi produk-produk lokal unggulan seperti dodol dan kembang goyang dalam berbagai event pameran. Ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat sektor UMKM secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi lokal seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 5) Lingkungan

Pada aspek lingkungan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, penelitian ini mengacu pada indikator mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam usaha.

Hasil temuan penelitian ini terkait mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam usaha ialah dalam Program Jakpreneur mempunyai pelatihan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan mencakup penggunaan bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan. Program pelatihan ini mencakup edukasi tentang pentingnya memilih bahan baku yang dapat terurai secara alami dan tidak merusak ekosistem. Selain itu, peserta pelatihan diajarkan teknik-teknik produksi yang meminimalkan limbah dan mengurangi penggunaan energi. Berdasarkan pernyataan dari KSP, menyatakan bahwa:

*“Sebagian besar umkm kita masih produksi rumahan, nah karna rumahan jadi barang-barang ramah lingkungan ini harga nya pasti lebih mahal dibandingkan barang konvensional lainnya. Tapi kita selalu berusaha tuh buat yuk kalau bazar kita ga paki plastik lagi, tetapi memakai tas daur ulang dan plastik dari singkong atau tanaman akar lainnya. Nah kita mencoba meskipun belum 100% tetapi mencoba beralih ke hal tersebut. Akan tetapi untuk seperti hal nya higienitas kita berkolaborasi degan suku dinas kesehatan atau dinas kesehatan terkait pelaksanaan gimana sih caranya berproduksi dengan sehat, baik, dan bersih.” (15 Mei 2024)*

Dari data diatas, sebagian besar UMKM masih melakukan produksi di rumah, sehingga tantangan utama adalah harga bahan

ramah lingkungan yang lebih mahal dibandingkan dengan bahan konvensional. Meskipun begitu, ada upaya untuk mendorong penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, terutama dalam kegiatan bazar, dengan menghindari penggunaan plastik dan beralih ke tas daur ulang serta plastik yang terbuat dari singkong atau tanaman akar lainnya.

Meskipun penerapan ini belum sepenuhnya 100%, langkah-langkah menuju perubahan tersebut terus dilakukan. Selain itu, untuk memastikan produksi yang higienis, ada kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang cara produksi yang sehat, baik, dan bersih.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam Program Jakpreneur, terdapat upaya nyata untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam usaha para UMKM. Pelatihan yang diselenggarakan fokus pada edukasi tentang pemilihan bahan baku ramah lingkungan dan teknik produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun sebagian besar UMKM masih melakukan produksi di rumah dengan tantangan harga bahan ramah lingkungan yang lebih tinggi, ada langkah-langkah konkret untuk mengubah praktik ini, seperti penggunaan tas daur ulang dan plastik dari singkong dalam bazar, meskipun belum mencapai implementasi 100%. Kolaborasi dengan dinas kesehatan juga dilakukan untuk memastikan bahwa produksi UMKM dilakukan dengan standar higienis yang baik. Namun, adopsi energi yang ramah lingkungan masih terbatas di kalangan binaan UMKM, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam skala yang lebih luas. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memberikan landasan hukum yang relevan untuk memperkuat inisiatif ini dan memastikan keberlanjutan praktik-praktik ramah lingkungan dalam usaha UMKM.

## **6) Personal**

Pada aspek personal antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, penelitian ini mengacu pada indikator pertumbuhan pribadi dan profesional.

Hasil temuan dari penelitian ini terkait indikator pertumbuhan pribadi dan profesional ialah dalam mengukur pertumbuhan pribadi dan profesional mereka selama menjalankan bisnis melalui berbagai cara, meskipun belum ada metode pengukuran formal yang diterapkan. Mereka biasanya mengevaluasi peningkatan keterampilan manajemen dan kepemimpinan, kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik, serta kemajuan dalam mencapai target bisnis. Selain itu, mereka juga menilai kesuksesan dalam memperluas jaringan profesional, peningkatan omset dan profitabilitas, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum ada untuk pengukurannya. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan PB, yang menyatakan:

*“Kita masih belum ada tolak ukurnya seperti itu.” (21 Mei 2024)*

Selanjutnya, untuk lebih akurat, pernyataan ini diperjelas oleh PB, yang menyatakan:

*“Kita itu sistemnya tidak seperti itu yang membina, kita fokus terhadap 20 orang dalam sekian tertentu tidak ada yang konkret seperti itu. Tapi kita hanya berdasarkan general saja, misalnya yang dengan media online sudah berapa gitu, terus yang sudah*

*pencatatan keuangan dengan aplikasi sudah berapa. Kita tidak mengukur secara konkret, karena kan kita fokus semisalnya sekian binaan kita lihat perkembangannya dari awal sampai akhir seperti dalam sekian bulan.” (21 Mei 2024)*

Dari data diatas, tidak ada standar atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi atau mengukur sesuatu dengan cara tertentu. PB mengungkapkan bahwa belum ada tolak ukur yang konkret atau sistematis yang digunakan dalam pembinaan, sehingga evaluasi dilakukan secara umum atau berdasarkan pandangan keseluruhan. Mereka fokus pada aspek-aspek umum seperti penggunaan media online atau pencatatan keuangan dengan aplikasi, namun tidak ada pengukuran yang konkret atau spesifik yang diadopsi.

Tetapi binaan masih memiliki kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka melalui berbagai pelatihan, seminar, dan program pembinaan yang tersedia diperkuat dari pernyataan informan PB:

*“Di Jakpreneur itu terbuka, bahkan sangat terbuka yang ingin cepat maju seperti mereka belum mendapatkan perizinan sama sekali itu mereka bisa mendapatkan perizinan apapun yang dibutuhkan selama berhubungan wirausaha ini akan dibantu.” (21 Mei 2024)*

Data diatas menunjukkan bahwa, Program Jakpreneur memiliki kebijakan yang sangat terbuka terhadap para wirausaha yang ingin berkembang dengan cepat. Mereka yang belum memperoleh izin usaha sama sekali dapat memperoleh segala izin yang diperlukan dengan bantuan dari program ini. Hal ini menunjukkan komitmen Program Jakpreneur untuk mendukung para wirausaha dalam mengatasi hambatan-hambatan administratif dan perizinan yang mungkin menghambat perkembangan bisnis mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam Program Jakpreneur, pertumbuhan pribadi dan profesional para wirausaha dinilai melalui berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan manajemen, kemampuan membuat keputusan strategis, dan ekspansi jaringan profesional. Meskipun demikian, belum ada metode pengukuran formal yang diterapkan untuk mengevaluasi pertumbuhan ini secara konsisten. PB mengungkapkan bahwa tidak ada tolak ukur yang konkret atau sistematis dalam pembinaan mereka. Evaluasi dilakukan secara umum berdasarkan kemajuan dalam penggunaan media online atau pencatatan keuangan dengan aplikasi, namun tidak ada pengukuran yang spesifik atau terstandar. Meskipun demikian, Program Jakpreneur memberikan kesempatan bagi para wirausaha untuk terus belajar dan berkembang melalui pelatihan, seminar, dan dukungan pembinaan yang tersedia. Selain itu, program ini juga menawarkan bantuan dalam hal perizinan usaha untuk mengatasi hambatan administratif yang mungkin dihadapi oleh para wirausaha. Meskipun pengukuran pertumbuhan pribadi dan profesional masih terbatas, terbukanya akses dan dukungan yang diberikan oleh Program Jakpreneur menunjukkan komitmen mereka untuk memfasilitasi perkembangan bisnis para wirausaha lokal secara holistik dan berkelanjutan.

Kesimpulan dari data diatas ialah Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu berhasil mencapai keselarasan antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, menunjukkan kolaborasi yang kuat dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha UMKM. Melalui pelatihan, akses permodalan, dan kebijakan inklusif, program ini berhasil meningkatkan signifikan pendapatan rumah tangga peserta, bahkan beberapa peserta melaporkan peningkatan hingga 100%. Keterlibatan aktif wirausaha dalam forum kebijakan publik,

didukung oleh dukungan yang luas dari pemerintah daerah, memperkuat sektor bisnis lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi, terutama media sosial, memberikan peran penting dalam mempromosikan dan mengembangkan bisnis, sementara pendamping membantu para binaan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal.

Meskipun tantangan masih ada, program ini terus melangkah menuju perubahan dengan kolaborasi dan dukungan yang terus berlanjut. Tidak ada standar atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi atau mengukur sesuatu dengan cara tertentu. PB mengungkapkan bahwa belum ada tolak ukur yang konkret atau sistematis yang digunakan dalam pembinaan, sehingga evaluasi dilakukan secara umum atau berdasarkan pandangan keseluruhan. Selain itu, para wirausaha tetap memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang melalui berbagai pelatihan dan program pembinaan yang tersedia, seiring dengan dukungan terbuka dari Program Jakpreneur dalam mengatasi hambatan administratif dan perizinan.

### **C. Sintesis Pemecahan Masalah**

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara dengan para narasumber terkait, keberhasilan Program Jakpreneur dan Pemberdayaan UMKM Program Jakpreneur di Kecamatan Pasar Minggu ditemukan permasalahan yaitu:

#### **1) Keberhasilan Program Jakpreneur**

- Kurangnya respon pemerintah terhadap penambahan kuota pelatihan.

Melalui hasil wawancara dan hasil pengamatan, peneliti menemukan permasalahan dalam hal respon pemerintah terhadap penambahan kuota. Walaupun kegiatan pelatihannya belum sempat dimulai, tetapi sudah memenuhi kuota pendaftaran pelatihan. Untuk mengatasi hal ini,

pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan kuota pelatihan yang lebih baik berdasarkan analisis data pendaftaran sebelumnya. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sosialisasi yang efektif, sangat penting. Pengembangan sistem IT yang canggih untuk pendaftaran dan pemantauan kuota secara real-time juga diperlukan. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan sistem IT yang canggih untuk pendaftaran dan pemantauan kuota secara real-time juga diperlukan. Dengan begitu, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan lancar dan efektif, meningkatkan kualitas serta kepuasan peserta.

## 2) Pemberdayaan UMKM pada Program Jakpreneur

- Kurangnya terobosan dan sedikitnya acara seperti bazar dan *event* bagi para binaan.

Berdasarkan hasil wawancara, para peserta Program JakPreneur dengan antusias mengungkapkan harapan mereka terhadap kemajuan program ini. Mereka berharap dapat lebih dikenal dalam pasar, mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam bazaar dan acara-acara terkait, serta melihat pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis mereka. Selain itu, mereka juga berharap untuk dapat memperluas promosi dan penetrasi pasar ke pasar internasional, serta mendapatkan dukungan yang lebih besar melalui pelatihan dan program binaan yang diselenggarakan oleh JakPreneur. Tidak hanya itu, para peserta juga menyoroti pentingnya adanya terobosan dalam meningkatkan daya beli dan omset penjualan usaha mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai tujuan ini, mereka membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan efektif dari Program JakPreneur. Masih belum ada standar atau kriteria yang ditetapkan untuk mengevaluasi.

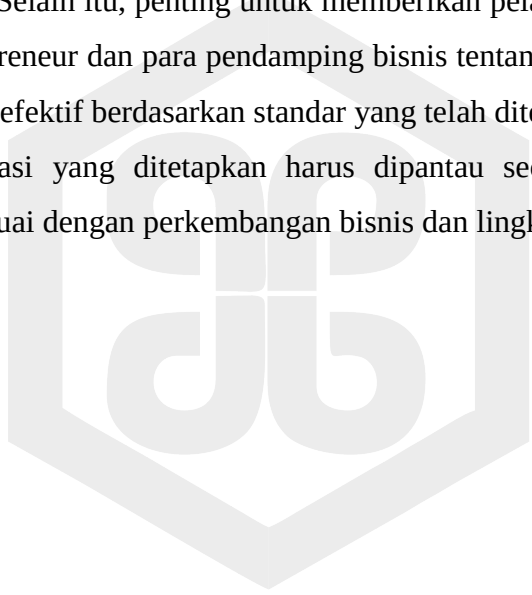
Untuk mengatasi masalah ini, Ada 4 beberapa langkah dapat diambil. Pertama, membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait

dalam industri acara dan bazar, seperti pemerintah daerah, organisasi non-profit, atau perusahaan swasta yang sering mengadakan acara tersebut. Kedua, mendorong inovasi di antara para binaan dengan memberikan dorongan untuk mengembangkan ide-ide baru dalam pemasaran dan promosi. Ini bisa termasuk penggunaan strategi pemasaran digital, teknologi, atau pengembangan produk baru. Ketiga, menyelenggarakan pelatihan khusus yang membantu para binaan merencanakan dan melaksanakan partisipasi dalam acara bazar dan event. Pelatihan ini akan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam acara-acara tersebut. Terakhir, Program JakPreneur dapat mengorganisir acara-acara sendiri yang didedikasikan khusus untuk para binaan, seperti bazar atau pameran. Ini akan memberikan platform yang terfokus bagi para binaan untuk mempromosikan produk dan layanan mereka kepada khalayak yang lebih luas. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam terobosan dan partisipasi para binaan dalam acara-acara bazar dan event, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka.

- Masih belum ada standar atau kriteria yang ditetapkan untuk mengevaluasi binaan.

Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakterediaan metode pengukuran resmi yang konsisten untuk menilai kemajuan pribadi dan profesional para pelaku bisnis. Meskipun berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan manajemen, ekspansi jaringan profesional, dan peningkatan omset dievaluasi, belum ada standar atau kriteria yang jelas untuk mengevaluasi hal-hal tersebut secara spesifik. Hal ini mengakibatkan evaluasi seringkali dilakukan secara umum atau berdasarkan pandangan keseluruhan, tanpa kerangka kerja konkret yang dapat memberikan panduan yang tepat.

Solusinya ialah dengan mengembangkan standar evaluasi yang jelas dan terukur. Program JakPreneur dapat melibatkan para ahli industri dan binaan dalam proses pengembangan standar tersebut untuk memastikan relevansinya. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada staf Program JakPreneur dan para pendamping bisnis tentang cara melakukan evaluasi yang efektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Terakhir, standar evaluasi yang ditetapkan harus dipantau secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perkembangan bisnis dan lingkungan eksternal.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**